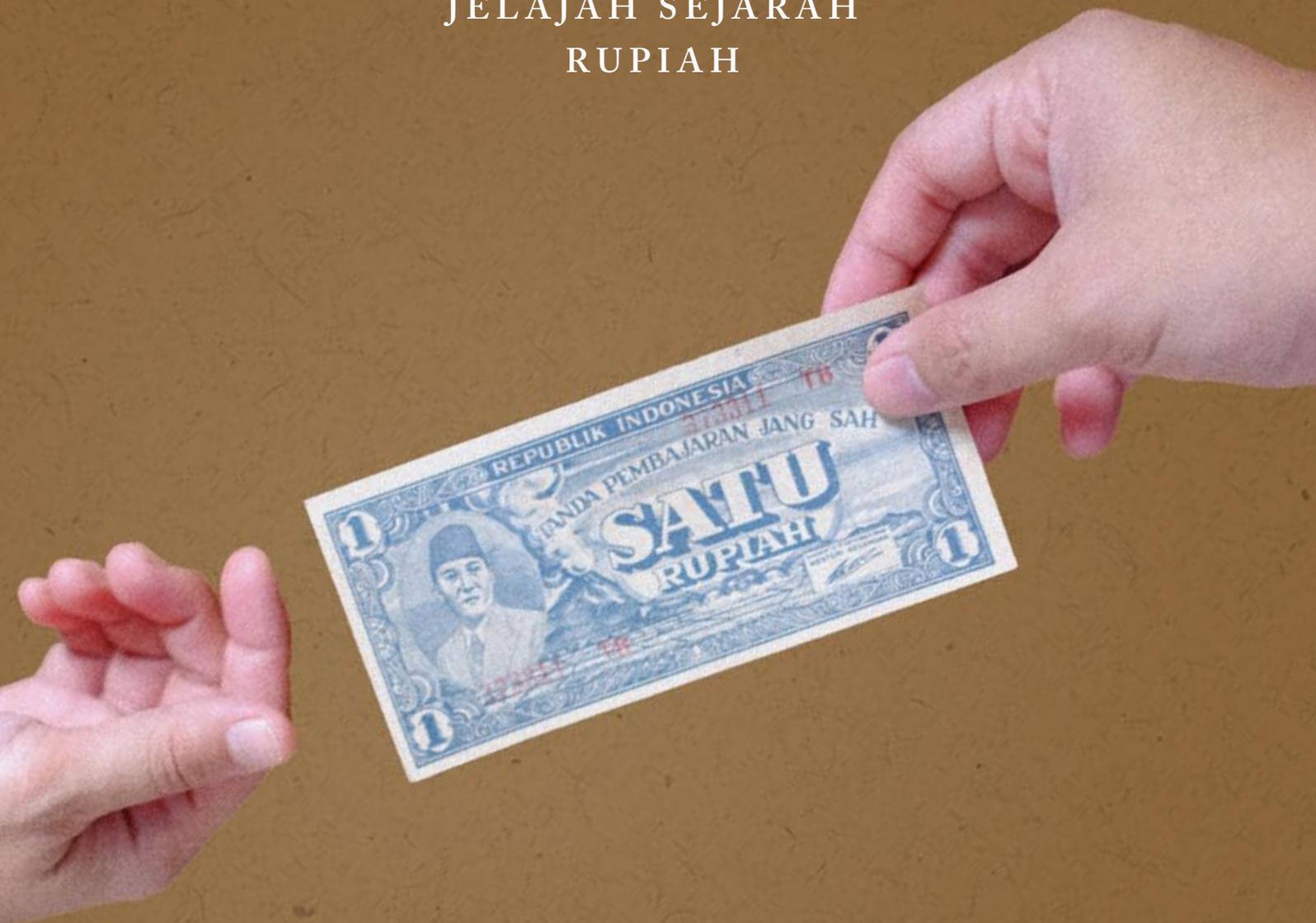


MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

EDISI KHUSUS
JELAJAH SEJARAH
RUPIAH



Sebelum seperti sekarang, mata uang Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan berliku. Rupiah tak hanya jadi alat pembayaran. Ia juga ditempatkan sebagai simbol kedaulatan. Bangsa Indonesia patut berbangga mempunyai mata uang sendiri sebagai pemersatu bangsa.

Daftar Isi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastruti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistyio. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

majalahmediakeuangan

DARI LAPANGAN BANTENG EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 9 Merentang Sejarah Uang
- 12 Uang Invasi Jepang
- 15 Lahirnya Uang Putih
- 18 Infografik
- 20 Dari Kopi Sampai ORI
- 23 Menahan Laju Uang Merah
- 28 Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah ORIDA
- 31 Berbeda-Beda Tetap Satu Juang

- 34 Infografik
- 36 Riwayat Uang RIS
- 39 Garis Hidup Maramis
- 42 Menghapus Warisan Kolonial

BUKU

- 42 Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Perjalanan Panjang Kedaulatan Negeri

‘**J**angan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah’. Judul pidato terakhir Presiden RI Ir. Sukarno pada Hari Ulang Tahun RI di tahun 1966 tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan, singkatan ‘Jasmerah’ seringkali digunakan untuk mengingatkan kita pada pentingnya mempelajari sejarah. Dalam peringatan Hari Oeang ke-74 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2020, Media Keuangan kembali mengusung tema sejarah sebagai isi tulisan dan artikel majalah. Pada bulan spesial ini, sejarah perjalanan panjang kedaulatan mata uang Rupiah dan kisah awal institusi Kementerian Keuangan menjadi tema laporan kami.

Meski disusun dalam situasi luar biasa karena badai pandemi COVID-19 yang sudah setengah tahun melanda negeri kita dan masih juga belum usai, penyusunan edisi Oktober tetap

kami lalui dengan proses riset dan pengumpulan data. Dalam proses ini, tim redaksi dibantu oleh tim redaksi Historia yang dikenal sudah berpengalaman dalam menyusun artikel sejarah. Tantangan penyusunan edisi khusus ini dimulai dari penentuan pembabakan dan metode pengumpulan data yang dilakukan di tengah-tengah situasi pandemi.

Dari fakta sejarah, kita tahu bahwa setelah deklarasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, kedaulatan negeri masih terus terancam oleh penjajah dan kedaulatan ekonomi juga mengalami banyak sekali tantangan mulai dari penggunaan berbagai jenis mata uang dan institusi keuangan dan moneter yang belum stabil dan masih terus diintervensi pihak luar. Namun, berkat gotong royong penduduk dan inisiatif dari para tokoh bangsa, Indonesia akhirnya bisa benar-benar

berdaulat dengan penggunaan satu mata uang yaitu Rupiah. Dengan kesadaran bahwa negara Indonesia telah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri, masyarakat juga mendukung kedaulatan dengan menggunakan Rupiah sebagai alat tukar meski pada saat awal kemerdekaan hal ini dapat mengancam nyawa mereka.

Semoga dalam peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-74 ini kita dapat meneladani semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan kedaulatan dan persatuan bangsa di tengah cobaan. Sama halnya dengan saat ini, saat bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, semoga semangat bahu membahu dan tak kenal lelah tetap terus dilakukan.

Selamat membaca!

Rahayu Puspazari

Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Land Drukkerij

Tanah percetakan atau "Land Drukkerij", itulah sebutannya sebelum berubah nama menjadi Percetakan Republik Indonesia (PRI) Tahun 1945. Percetakan yang telah berdiri sejak zaman pemerintah Belanda tahun 1809 ini, memiliki tugas untuk mencetak dokumen-dokumen negara berupa berita negara dan lembaran negara. Selain itu, pada awal kemerdekaan, PRI juga mendapatkan tugas untuk mencetak ORI (Oeang Republik Indonesia). Dalam perjalanan sejarahnya, PRI mengalami beberapa kali perubahan nama sampai sekarang berubah nama menjadi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.



Merentang Sejarah Uang

Uang telah digunakan di Nusantara sejak zaman kuno. Butuh waktu lama untuk menyatukan mata uang.

Masihkah Anda membawa uang di dompet? Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan uang kartal (kertas dan logam) mengalami penurunan. Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk memilih uang elektronik. Evolusi uang tengah berlangsung.

Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu. Namun tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar.

Selama berabad-abad berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang.

“Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang

paling menakjubkan,” tulis Solikin dan Suseno dalam *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*.

Pada awalnya, uang berfungsi sebagai alat penukar atau pembayaran. Seiring perkembangan peradaban manusia, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda.

Tampilan uang pun terus mengalami evolusi. Dari awalnya berbentuk barter, kemudian ke kulit kerang, koin, kertas, plastik, dan kini dalam bentuk elektronik. Lalu bagaimana nasib uang kartal? Akankah uang punah dan hanya menjadi pelengkap museum?

Sebelum hal itu terjadi, tak ada salahnya kita mengenal sejarah uang di Indonesia.

Bukti tertua

Museum Nasional memiliki koleksi dua uang logam (no. inv. 2087 dan no. inv. 2119) dari zaman Hindu-Buddha di Jawa yang terbuat dari perak. Bentuknya cembung, sisi depan bergambar pot bunga, dua tangkai bunga, dan garis-garis lekuk sekitarnya seperti ruang-asap. Sedangkan pada sisi belakang terdapat bunga lotus mekar terletak di

dalam garis berbentuk persegi empat.

“Menurut *Candra Sengkala Memet*, bahwa gambar-gambar tersebut mempunyai arti sebagai berikut: pot bunga berarti 9, bunga berarti enam dan ruang asap berarti 5. Dari angka-angka itu, diperkirakan mata uang ini digunakan sebagai alat tukar sekitar tahun 569 [Saka] atau tahun 647 AD (Masehi),” demikian disebut dalam *Katalog Pameran Peringatan Ulang Tahun Ke-200 Museum Pusat*.

Uang logam perak itu menjadi bukti tertua penggunaan uang di Jawa. Selain mata uang perak, menurut arkeolog Supratikno Rahardjo dalam *Peradaban Jawa*, ditemukan juga mata uang emas. Paling awal berbentuk batangan, jumlahnya sedikit, dan ukurannya tidak tentu baik bentuk maupun berat. Ini mengindikasikan mata uang itu tak digunakan secara umum sebagai alat tukar.

Sebagian besar mata uang emas yang ditemukan di Jawa Tengah berasal dari abad ke-9 dan ke-10 dan termasuk tipe *piloncito* (ukurannya kecil, gepeng seperti dadu dengan sudut-sudut membulat).

“Meningkat mata uang Jawa pada masa awal menggunakan logam-logam

Suasana pasar di Jawa Tengah

Foto Perpusnas



Emas pernah digunakan sebagai alat transaksi pembayaran

Foto Historia

mulia (emas dan perak) yang jumlahnya tentu terbatas,” tulis Supratikno, “maka sebagian transaksi mungkin tidak menggunakan mata uang, melainkan dengan cara barter.”

Uang kepeng

Sejarawan Anthony Reid dalam *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680* jilid 2 mengungkapkan bahwa di Jawa, prasasti tak lagi menyebut mata uang Jawa (perak dan emas, *red.*) setelah sekira tahun 1300, kecuali hanya menyebut *picis*, mata uang tembaga dari Tiongkok. Bentuknya kecil bulat mempunyai lubang persegi di tengah agar dapat diikat sebanyak seribu.

Menurut sejarawan Denys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya*, kelebihan uang *kepeng* itu tidak langsung tampak. Banyak orang mula-mula menggunakannya untuk

memperoleh komoditas yang digemari, yaitu tembaga. Artinya, uang itu dibarter dengan komoditas seperti rempah-rempah.

“*Kepeng* Cina itu mulai tersebar bersamaan dengan majunya perniagaan [Dinasti] Sung dan secara khusus membanjiri Jawa yang peran perantaranya dalam jaringan niaga sedang menguat,” tulis Lombard.

Tingginya permintaan uang *kepeng* di Jawa memicu penyelundupan dari Tiongkok dan pembuatan tiruannya dari logam campuran (perak, timah, timbal, dan tembaga). Di Jawa, uang tiruan ini disebut *gobog* dengan lubang persegi di tengah-tengah dan garis tengah yang lebih besar.

Reid menyebut tujuan pembuatan uang *kepeng* tiruan di Jawa dan di tempat lain adalah untuk menjaga persediaan karena hubungan langsung

dengan Tiongkok menurun sekitar tahun 1500. “Bagaimanapun mata uang tembaga Cina dan mata uang timah tiruannya telah menjadi dasar penggunaan mata uang di Asia Tenggara pada tahun 1500,” tulis Reid.

Uang kerajaan dan eropa

Selain mata uang dari Tiongkok, kerajaan-kerajaan Islam juga mengeluarkan mata uang. Hermanu dalam *Seri Lawasan: Uang Kuno*, mendatanya. Misalnya, Kesultanan Pasai dan Aceh (*dirham* dan *mass* dari emas dan *keuh* atau *kasha* dari timah), Banten (*kasha* dari tembaga), dan Cirebon (*picis* dari timah).

Kedatangan bangsa Eropa membawa mata uang baru. Pada abad ke-16, Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak, yaitu *piastre* Spanyol yang disebut juga *mat*, *pasmal*, *real*, atau *dollar*.

Setelah Portugis, Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) menancapkan kaki di Nusantara. Pada masa jayanya, beredar bermacam-macam mata uang seperti *rijksdaalder*, *dukat*, *stuiver*, *gulden*, dan *doit*. Bahan yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, nikel dan timah. Bentuknya bundar pipih dengan ukuran diameter yang tidak sama. Mata uang tersebut dibuat di Negeri Belanda.

“Kemungkinan kata ‘duit’ yang kita kenal sekarang ini berasal dari kata *doit* yang kemudian dalam bahasa Arabnya berbunyi *doewit*,” tulis Djani A. Karim dalam *Mata Uang dalam Sejarah*.

Beredar pula mata uang ini dari emas dan perak *dirham Jawi* atau *dukat Jawa* yang dibuat di Batavia (Jakarta) dengan ditandai tulisan Arab. Bentuk dan ukurannya sama dengan mata uang lain yang dibuat dari tembaga dan timah. Uang tersebut, menurut Lombard, dibuat setelah tercapai kesepakatan antara Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Baron van Imhoff dan Sunan Mataram Pakubuwana II.

Menjelang bubar, catat Hermanu,

VOC membuat uang darurat dari potongan-potongan batang tembaga berbentuk segi empat yang dicetak di Batavia. Uang ini disebut *bonk*.

Setelah VOC bubar, Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Republik Bataaf (1799-1806). Mata uang yang dikeluarkan bertuliskan *Indie Batavorum* dengan satuan nilai *gulden* dan *stuiver*.

Ketika Belanda diduduki Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) mengedarkan mata uang berinisial LN singkatan dari Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, yang menjadi raja Belanda. Bentuk uang itu bundar pipih dan terbuat dari tembaga.

Inggris mengambil alih Hindia Belanda dengan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal (1811-1816). Raffles membuat mata uang *rupee* yang bentuknya bundar pipih dan terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Kedua sisinya tertera tulisan Jawa dan Arab. Mata uang ini dicetak di Batavia. Diperkirakan kata “rupiah”, mata uang Republik Indonesia, berasal dari *rupee* yang ditulis dalam bahasa Arab dengan ucapan *roepiyah*. Selain *rupee*, beredar pula uang bertuliskan EIC (East India Company atau Kongsi Dagang India Timur).

Penyatuan mata uang

Setelah Inggris hengkang, Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Pemerintah membentuk De Javasche Bank (DJB) pada 1828 untuk mengatur pembuatan dan peredaran uang. Bank ini mencetak uang kertas dan uang logam.

Menurut Lombard, sejak pertengahan abad ke-18 berbagai usaha dilakukan untuk menyehatkan moneter dan menyatukan mata uang. Tapi baru satu abad kemudian penyederhanaan itu terlaksana. Pada 1854 diputuskan semua mata uang yang digunakan di Hindia Belanda diganti dengan mata uang yang beredar di Belanda.

“*Gulden*, simbol kekuasaan ekonomi Eropa yang terus meningkat, sedikit demi sedikit menjadi uang yang harus digunakan di seluruh Nusantara,” tulis Lombard. “Baru setelah tahun 1930 kesatuan mata uang menjadi kenyataan.”

Kesatuan mata uang pupus masa pendudukan Jepang. Pada awalnya Jepang tak mencetak uang sendiri. Mata uang lama dari pemerintahan sebelumnya masih berlaku, yakni *gulden* (“rupiah Belanda”) dan “*gulden* Jepang” yang telah dipersiapkan Jepang untuk daerah-daerah pendudukan. Hingga akhirnya Jepang menerbitkan mata uang baru.

Setelah Indonesia merdeka, tak adanya kesatuan mata uang masih berlangsung. Uang Jepang masih dianggap sebagai uang sah pada awal kemerdekaan Indonesia bersama uang DJB keluaran 1925-1941, dan uang pemerintah Hindia Belanda terbitan 1940-1941.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) tetapi juga harus berhadapan dengan “uang NICA” (Netherlands-Indies Civil Administration). Bahkan karena terhambatnya peredaran ORI, pemerintah memberi izin pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal dengan nama Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

Penyeragaman mata uang baru terjadi setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Menyusul terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), terbit uang RIS atau juga disebut “uang federal”.

Pada 17 Agustus 1950, pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar. Bentuk pemerintahan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan mata uang RIS menyusul kemudian.

Hingga kini, mata uang rupiah dalam bentuk uang kartal masih digunakan;

Masyarakat tanpa uang

Era digital mendorong penggunaan uang elektronik. Pemerintah juga tak berpangku tangan. Bahkan mendorong sistem keuangan digital lebih berkembang di Indonesia. Namun bukan berarti uang kartal tidak dibutuhkan.

Menurut Hatib Kadir, dosen antropologi Universitas Brawijaya, dalam kolomnya bertajuk “Punah dan Kotornya Uang ‘Cash’”, dari beragam fungsi uang, revolusi terbesar terjadi pada metode uang sebagai alat pembayaran karena caranya terus mengalami perubahan.

“Sebagai alat bayar, uang pada saat ini beralih fungsi sebagai informasi. Ketika menerima gaji misalnya, kita tidak melihat uang kita karena langsung ditransfer di bank,” ujarnya.

Hatib Kadir menambahkan, perubahan penggunaan uang bertujuan memudahkan fungsi uang yang bahkan ada sejak zaman Mesopotamia. Teknologi semacam ponsel membantu untuk memudahkan hal tersebut.

“Penggunaan uang elektronik bukan seperti penemuan pesawat terbang yang canggih, namun sebenarnya ada hal yang tetap dalam uang. Ia merupakan konvensi, kesepakatan dan seperangkat relasi dalam organisasi yang kompleks di masyarakat. Nilai dan fungsinya tetap sama,” ujarnya.

Kendati demikian, uang kartal masih dibutuhkan. Indonesia tetap mencetak dan mengawasi uang kartal. Proporsinya memang berkurang tetapi bentuk penggunaan uangnya saja yang bergeser.

Namun uang kartal juga bukan tanpa kelemahan. Biaya pengadaan dan pengelolaannya terbilang mahal. Belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran dan risiko keamanan seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Karena itu pula, masyarakat terus diedukasi untuk memakai alat pembayaran nontunai demi terbentuknya *cashless society* atau masyarakat nontunai.*

Uang Invasi Jepang

Jepang tak hanya menginvasi wilayah Indonesia dengan kekuatan militer tapi juga dengan uang.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada Maret 1942, segala tatanan pemerintahan Belanda pun dilucuti. Di sektor perekonomian, secara bertahap Jepang membangun sistem keuangan, membubarkan bank-bank Belanda, hingga mencetak uang.

Pada awalnya Jepang tak mencetak uang sendiri. Mata uang lama dari pemerintahan sebelumnya masih berlaku, yakni gulden (“rupiah Belanda”) dan uang militer (gunpyo) – dikenal juga dengan istilah uang invasi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 yang dikeluarkan Jepang pada 7 Maret 1942. Yang dimaksud uang militer adalah uang yang telah dipersiapkan Jepang untuk daerah-daerah pendudukan: gulden untuk Hindia Belanda, straits dollar untuk Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara, rupee untuk Burma, peso untuk Filipina, dan pound untuk Australia (Australia Trust Territories). Gulden Jepang kemudian juga dikenal sebagai “rupiah Jepang”.

Keesokan harinya, terbit UU Nomor 2 yang menetapkan tiga mata macam uang kertas yang sah, yaitu f

10,- (sepuluh rupiah), f 5,- (lima rupiah), dan f 1,- (satu rupiah) serta uang kecil (logam) meliputi 50 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Mata uang lain yang beredar di luar ketujuh macam uang tersebut, dianggap tidak sah dan dilarang peredarannya.

Selama itu, Jepang menegaskan mengenai larangan-larangan yang akan mengacaukan sistem perekonomian seperti mengganggu peredaran uang militer dan uang rupiah, menerima uang lain yang tidak sah, memalsu, mengubah atau membuang uang sah, mengacaukan persamaan harga uang dan menyimpan atau menyembunyikan uang pecahan satu rupiah ke bawah melebihi seratus rupiah.

Bank sirkulasi

Untuk mencegah kekacauan di bidang ekonomi, Jepang menghentikan sementara waktu seluruh bank di wilayah kekuasaan Jepang. Segala urusan mengenai uang harus mendapat izin dari pemerintah Jepang. “Maka sekalian kuasa dari bank-bank harus menghadap selekas-lekasnya ke kantor pemerintah Balatentara untuk menerima keterangan dan menunggu perintahnya buat

mengerjakan lagi,” tulis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Keuangan, 8 Maret 1942.

Sementara sebagai bank sentral, Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko yang mulai beroperasi pada Juli 1942. “Dengan memimpin dan menjaga segala keperluan uang antara kantor-kantor bank serta dengan mengawasi segala urusan keuangan,” tulis Kan Po (Berita Pemerintah) No. 14 Tahoen ke II Boelan 3-2603.

Menurut Erwien Kusuma dalam *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, untuk menggantikan peran De Javasche Bank, pemerintah Jepang menetapkan Nanpo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi. Semua bank berada di bawah pengawasan Nanpo Kaihatsu Ginko. “Selain itu, tugas utama dari Nanpo Kaihatsu Ginko adalah juga sebagai likuidator yang terdiri dari orang-orang Jepang yang dibantu oleh beberapa anggota staf dan tenaga tata usaha dari bank-bank bersangkutan,” tulis Erwien.

Lalu, pada 3 Oktober 1942, Jepang juga membuka Syomin Ginko atau Bank Rakyat sebagai pengganti Algemeene Volkscredietbank. Bank inilah yang



Rakyat Indonesia sibuk menukarkan uang jepang dengan uang Republik Indonesia sehubungan dengan diadarkannya uang RI

Foto Historia

di kemudian hari menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI). “Pembukaan bank tersebut, yang mempunyai cabang-cabang pada 68 tempat di seluruh Pulau Jawa, sudah tentu akan memperbaiki jalannya perekonomian dan peredaran uang, serta meringankan beban penghidupan rakyat,” tulis Pengumuman Ginseikaku seperti disiarkan Kan Po (Berita Pemerintah) No.4 Tahoen ke I Boelan 10-2602.

Nasib bank-bank yang dihentikan sementara menjadi jelas pada Oktober 1942. Melalui UU Nomor 44 Osamu Seirei Nomor 13 Panglima Besar Balatentara Dai Nippon secara resmi membubarkan sembilan bank. Lima bank merupakan bank Belanda yang meliputi De Javasche Bank, Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V., Nederlandsch-Indische Escompo Maatschappij N.V.

dan Batavia Bank N.V. Empat bank lainnya merupakan bank swasta yakni The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, The Chartered Bank of India, Australia, and China Ltd., Bank of China, dan Oversea Chinese Banking Corporation Ltd. Kesembilan bank tersebut, meski telah dibubarkan, masih harus menyelesaikan urusan utang-piutang. Sebagai gantinya, Maklumat Gunseikan Nomor 1 dikeluarkan pada 15 Maret 1943. Isinya memberikan izin operasi bank-bank Jepang seperti Yokohama Syookin Ginko, Taiwan Ginko, Kanan Ginko, dan Mitsui Ginko. Bank-bank tersebut diperkenankan mengurus wesel.

Cetak uang

Berdasarkan konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, pihak yang menduduki suatu negara lain dilarang mengeluarkan uang sendiri. Jepang ikut meratifikasi tapi mengabaikan isi konvensi. Ini bermula dari beragam

persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Banyak uang yang beredar rusak. Uang kertas cobak-cabik sementara uang logamnya rompeng. Hal ini memunculkan aktivitas jual-beli uang. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang membuka penukaran uang rusak dengan uang baru di kantor-kantor keuangan. Namun, hal ini justru menimbulkan kesalahpahaman. Penduduk mengira mata uang lama sudah tak berlaku dan diganti dengan mata uang baru. Pemerintah harus dua kali kerja mengurus penukaran uang rusak ini.

Pemerintah Jepang akhirnya menerbitkan uang kertas baru dengan pecahan f 10,- (sepuluh rupiah) yang berlaku sejak 15 Oktober 1944. Uang ini berwarna dasar kuning dengan gambar Gatotkaca di satu sisi serta gambar stupa Borobudur dan patung Buddha di sisi sebaliknya.

Pada akhir 1944, Jepang kembali menerbitkan uang kertas baru. Pecahan

kali ini adalah f 5,- (lima rupiah) dan f 1,- (satu rupiah). Pecahan lima rupiah berwarna dasar hijau muda dengan gambar rumah Gadang di satu sisi dan gambar perempuan Minang di sisi sebaliknya. Sementara pecahan satu rupiah berwarna dasar hijau tua dengan gambar petani di satu sisi dan pohon beringin dengan warna merah hitam (sepia) di sebaliknya. Dua uang kertas ini berlaku sejak 1 Januari 1945.

Lalu, pada Februari 1945, Jepang mengeluarkan lagi uang baru bernilai f 0,50 (lima puluh sen) yang mulai berlaku 20 Februari 1945. Uang sen ini kali ini bukan kertas melainkan logam. Warna dasarnya kuning-atal dengan gambar naga di satu sisi dan dihiasi ornament di sisi baliknya.

Tak lama setelah itu, Jepang mengeluarkan lagi uang kertas. Kali ini nominalnya cukup besar, f 100,- (seratus rupiah), yang kemudian menjadi pecahan paling tinggi. Uang kertas ini berwarna dasar hijau muda, dilengkapi gambar Dewa Wisnu menunggang Garuda dan terdapat pula patung singa. Bagian sebaliknya berwarna dasar hijau abu-abu dengan gambar wayang pada bagian tengahnya.

Menurut Tim Penulis LP3ES dalam *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, hingga akhir pendudukan Jepang, jumlah uang militer yang beredar diperkirakan mencapai lebih dari empat milyar rupiah. “Dari jumlah tersebut lebih kurang Rp 2,4 milyar beredar di Jawa, sedangkan di Sumatra sekitar Rp 1,6 milyar. Di Kalimantan dan Sulawesi juga beredar sejumlah uang invasi, hanya saja tidak diketahui jumlahnya,” tulis Tim Penulis LP3ES.

Uang Jepang masih dianggap sebagai uang sah pada awal kemerdekaan Indonesia bersama uang De Javasche Bank keluaran 1925-1941, dan uang pemerintah Hindia

Belanda terbitan 1940-1941. Riwat uang Jepang tamat karena pengaruh uang NICA (Netherlands-Indies Civil Administration) dan pemerintah Indonesia menerbitkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sejak Oktober 1946.

Kasus-kasus Penyelundupan Pada 1 Oktober 1946, melalui UU Nomor 17 Tahun 1946 Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Penukaran uang Jepang ke ORI juga kemudian dilakukan di bank-bank republik. Namun, di daerah-daerah ternyata uang Jepang masih digunakan dan kala itu tak jarang pula terjadi kasus-kasus penyelundupan.

Kasus yang cukup besar terjadi di Sebalang, Lampung. Cerita bermula dari permintaan Komandan Front Selatan Mayor Sukardi Hamdani kepada seorang Letnan II bernama Muhammad Musa untuk mencari pelor senjata api dan uang Jepang pada Oktober 1947. Muhammad Musa kemudian meminta bantuan seorang Tionghoa bernama Lo Kai Su. Disepakati bahwa 50 persen selundupan untuk Lo Kai Su. Maka berangkatlah ia dengan beberapa orang Tionghoa ke Jakarta.

Menurut arsip Kantor Besar Kepolisian Karesidenan Lampung, kapal itu baru kembali ke Sebalang pada 10 Januari 1948. Dari sebuah perahu yang menepi di pantai Sebalang, uang Jepang diangkut dengan gerobak oleh dua orang Tionghoa. Gerobak bermuatan 17 karung uang Jepang itu dibawa menuju bekas rumah administrateur Sebalang. “Uang itu sudah disimpan dalam gudang beras Sebalang. Perahu yang meneruskan perjalanannya, ke Telokbetong dengan membawa sebagian uang,” terang Laporan Kepolisian Karesidenan Lampung, tertanggal 21 Januari 1948.

Aksi ini ternyata telah dipersiapkan

dengan matang. Sejak Oktober 1947, Mayor Sukardi telah memerintahkan diadakannya latihan militer untuk pekerja kebun di Sebalang. Latihan ini ternyata dimaksudkan untuk mengamankan kedatangan uang selundupan dari Jakarta. Laporan Kepolisian Karesidenan Lampung tertanggal 29 Januari 1948 menyebut Mayor Sukardi bahkan memasang saluran telepon baru di rumah kepala kampung Tarahan. Telepon dipasang untuk memperlancar komunikasi terkait penyelundupan ini. Jikalau uang Jepang datang, Mayor Sukardi bisa langsung mendapat kabar.

Aksi ini diketahui oleh pihak kepolisian pada 13 Januari 1948. Dari penyelidikan, ditemukan uang Jepang 4,5 juta rupiah di tangan Mayor Sukardi. Sementara dari seorang Tionghoa bernama A Jok ditemukan uang Jepang sejumlah 1,7 juta rupiah.

Penyelundupan lainnya terjadi di Wonosobo pada Juni 1948. Kali ini, penyelundupan melibatkan seorang pengusaha tembakau bernama Tio Kang Pwee. Uang Jepang diselundupkan dalam gerobak bermuatan tembakau menuju Yogyakarta.

Dalam laporan Kepolisian Karesidenan Kedu, kiranya tujuh gerobak bermuatan 200 besek tembakau diangkut ke Yogyakarta. Di antara besek-besek tersebut ditemukan satu peti blek berwarna merah berisi uang Jepang sejumlah 181.585 rupiah. Modus ini diketahui pada 16 Juni 1948 ketika gerobak sampai di Yogyakarta. Sementara Tio Kang Pwee tengah berada di Semarang, seorang pekerja yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan tembakau itu tak tahu-menahu mengenai uang Jepang tersebut.

Lahirnya Uang Putih

Oeang Republik Indonesia (ORI) tak hanya berperan sebagai alat bayar. Ia juga alat perjuangan bangsa dan simbol kedaulatan negara. Semasa periode mempertahankan kemerdekaan, orang yang memegang ORI bisa ditangkap oleh tentara Belanda.

Pada perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020, Bank Indonesia mengeluarkan uang baru edisi khusus pecahan Rp75.000. Desain uang ini elegan dan sarat makna. Bagian muka bergambar wajah Sukarno dan Mohammad Hatta. Bagian belakang berupa gambar wajah orang Indonesia dari beragam suku dan daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Rupiah mengamatkan bahwa rupiah tak hanya alat pembayaran. Ia juga harus ditempatkan sebagai simbol kedaulatan. Bangsa Indonesia patut berbangga pula mempunyai mata uang sendiri sebagai pemersatu bangsa. Ini tak lepas dari sejarah rupiah ketika masih bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). Uang itu mulai beredar pada 30 Oktober 1946.

Cerita ORI bermula dari banyaknya mata uang di Indonesia saat awal kemerdekaan. Ada empat mata uang;

tiga dikeluarkan Jepang dan satu mata uang peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Peredaran empat mata uang itu merugikan Indonesia. “Menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan,” catat Oey Beng To, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*.

Menyikapi situasi ini, Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat, sejenis badan legislatif sementara RI, mengusulkan jalan keluar.

Dalam sebuah pertemuan dengan Hatta pada Oktober 1945, Sjafruddin membawa usulan dari pemuda Bandung yang dia lupa namanya. “Supaya mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu,” kata Sjafruddin dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa*.

Hatta sebelumnya sempat mendengar usulan ini. “Namun karena

Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat

Foto Historia

keterbatasan sarana, dana, dan langkanya tenaga ahli dalam bidang itu, maka tuntutan seperti itu terpaksa untuk sementara waktu diabaikan,” ungkap Mohamad Iskandar dalam “Oeang Republik dalam Kancah Revolusi”, termuat di *Jurnal Sejarah* Volume 6 No 1, Agustus 2004.

Sjafruddin terus meyakinkan Hatta bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. “Pada akhirnya beliau dapat diyakinkan,” lanjut Sjafruddin. Pemerintah berkeputusan bulat mencetak uang sendiri.

Uang Pemerintah

Menteri Keuangan A.A. Maramis menindaklanjuti keputusan itu. Dia bergerak cepat. Sebab, tentara Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentara Sekutu bisa saja mengambil-alih keadaan. Maka dia menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta bergerak ke beberapa tempat di Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk mencari percetakan.

Di Jakarta ada percetakan G. Kolff yang berpengalaman dalam urusan mencetak uang sejak zaman Hindia Belanda. Ada pula percetakan De Unie. Sementara Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF). Tapi semua percetakan itu kesulitan memperoleh alat-alat untuk mencetak uang seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia.

Tim bentukan Maramis juga menghadapi tantangan yang tak kalah sulit. Pertempuran antara pejuang Republik dan Sekutu meletus di beberapa daerah. Jalan-jalan ditutup dan dikuasai tentara Sekutu. Untuk menerobos blokade itu, sejumlah buruh percetakan menyelundupkan alat-alat pencetak uang.

“Berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di

Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan dan alat itu diperoleh,” catat Oey Beng To.

Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya T.R.B. Sabarudin, saat itu menjabat pula sebagai direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff.

Kerja Panitia cukup baik. Mereka mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah dari pukul 07.00-22.00. Litografinya dibuat di Percetakan De Unie. Abdulsalam dan Soerono tercatat sebagai pelukis pertama ORI.

Tapi uang itu belum sempat diberi nomor seri. Situasi keamanan di Jakarta memburuk. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara.

Kerja percetakan uang diambil-alih oleh percetakan NIMEF di Malang dan percetakan swasta lain di Solo, Yogyakarta, dan Ponorogo. Tempat-tempat ini relatif aman karena berada di bawah kekuasaan Republik.

Selama masa percetakan ORI, pemerintah Indonesia berupaya menjaga laju inflasi dengan mulai menarik mata uang Hindia Belanda dan Jepang dari wilayah RI. “Untuk memperkuat tujuan itu, pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang No 10 Tahun 1946,” catat Iskandar. Salah satu isinya tentang larangan membawa uang senilai 1.000 gulden dari satu karesidenan ke karesidenan lain tanpa izin.

Sebaliknya, tentara NICA ingin menjegal segala macam upaya penerbitan ORI. Mereka mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya tiga persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya “uang

merah” karena warna dominannya.

Tindakan itu membuat marah pemerintah Indonesia. Selain menimbulkan inflasi, peredaran uang NICA melanggar kedaulatan.

“Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyebutnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi belum stabil,” tulis tim Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) dalam *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah*.

Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang sesuai seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak.

“Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya kurs. Dari tiga persen menjadi empat bahkan lima persen,” ungkap tim Depkeu RI.

Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblrik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Beredarnya ORI ditopang oleh UU No. 7 Tahun 1946 dan UU No. 10 Tahun 1946. Isinya antara lain menjelaskan nilai ORI, bentuk fisik, dan menegaskan bahwa ORI dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat bayar yang sah. “Dengan demikian ORI merupakan uang pemerintah, bukan uang bank,” ungkap Oey Beng To.

Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.”

Rakyat menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya “uang putih”. Rosihan Anwar, jurnalis senior, mencatat pengalamannya pada awal peredaran ORI di Jakarta. “Seorang tukang becak

yang memilih pembayaran 20 sen uang kita daripada pembayaran dengan uang NICA,” tulis Rosihan dalam *Kisah-Kisah Menjelang Clash ke-1*.

ORI jatuh

Kurs ORI terhadap uang NICA fluktuatif. Saat awal beredar, 1 ORI berbanding 2 uang NICA. Sangat kuat. Tapi lama-lama merosot hingga 1:5. Bahkan saat agresi militer ke-2 pada 19-20 Desember 1948, nilai ORI tenggelam. Butuh 500 ORI untuk menebus 1 florin uang NICA.

Kemerosotan ORI berkaitan dengan kian sempitnya wilayah Republik, tekanan tentara NICA terhadap pemakai ORI, dan inflasi.

Perjanjian Renville memaksa pemerintah RI menarik mundur pasukannya di berbagai wilayah, kecuali Sumatra, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sebab, daerah di luar ketiga itu berada di bawah kekuasaan Belanda. Ini berdampak pada ORI. NICA melarang peredaran ORI di daerah kekuasaan Belanda.

NICA seringkali mengintimidasi warga di perbatasan yang menyimpan ORI. Karena perlakuan ini, warga ketakutan. Mereka memilih menyimpan uang NICA. Tapi di sisi lain, pejuang pro-Republik juga kadang mengintimidasi warga yang menyimpan uang NICA. Akibatnya warga terjebak di antara dua pilihan.

Selain itu, NICA memalsukan ORI untuk membuat nilai ORI jatuh akibat inflasi. Uang palsu ini beredar di beberapa wilayah Republik. Arsip Djawatan Kepolisian Negara tertanggal 25 Maret 1948 misalnya menyebut penemuan uang palsu di Banyumas dari para pedagang tembakau.

Kepolisian meyakini para pedagang tak mengetahui mereka bertransaksi dengan uang palsu. “Orang-orang pedagang tembakau mungkin tidak mempunyai sengaja jahat dan *onbewust* (tak sadar) menerima uang-uang palsu itu,” tulis arsip No. Pol. 60/Pam/A.R.



Foto
Historia

Kepolisian melaporkan kasus ini kepada Kementerian Keuangan. Jawaban dari Menteri Keuangan, “Jang Mulia Menteri Keuangan menyatakan bahwa pembikinan uang palsu dilakukan mungkin oleh pihaknya Belanda,” catat arsip tersebut.

Cetak lebih banyak

Selama periode ini, pemerintah Indonesia tak hanya menghadapi berbagai persoalan keuangan, tapi bagaimana membiayai pembangunan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Pemerintah tak punya cukup dana. Maka pemerintah mengambil keputusan *deficit-financing* atau membiayainya dengan mencetak ORI lebih banyak lagi. Risikonya inflasi akan meninggi.

Keputusan itu terpaksa diambil. Sebab pemerintah tak mungkin menarik pajak dan mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana pendukung

kemerdekaan juga makin menipis. “Maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut adalah paling baik,” terang Oey Beng To.

Beng To menyebut kebijakan ini mirip dengan kebijakan koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat ketika awal kemerdekaannya pada tahun 1776. Mereka mencetak uang sendiri (*continental money/greenbacks*) untuk melawan Inggris. Tapi Beng To melihat kemerosotan ORI tak separah *continental money*.

Seturut penandatanganan Konferensi Meja Bundar dan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi federal, ORI berhenti beredar pada Maret 1950. Ia diganti uang baru. Tapi peredarannya selama 3 tahun 5 bulan menjadi titik mula kesadaran tentang fungsi uang sebagai alat perjuangan kedaulatan dan pembiayaan negara.*

PERJALANAN DAN SELUK BELUK

MATA UANG INDONESIA

Bangsa kita patut berbangga, tak lama usai deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia, negeri ini akhirnya punya mata uang sendiri sebagai alat pemersatu bangsa. Cerita manis ini tak lepas dari sejarah Rupiah ketika masih bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). Mulai beredar pada 30 Oktober 1946, kemudian tanggal itu pun ditetapkan sebagai Hari Oeang dan diperingati setiap tahunnya oleh institusi Kementerian Keuangan.



SEPTEMBER

1945

Pendudukan Jepang berakhir. Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda tetap kembali ke wilayah bekas koloninya dengan membonceng Sekutu. Belanda memutuskan menarik mata uang rupiah Jepang dan menggantinya dengan uang NICA.

15 MARET

1946

Pihak Republik mengeluarkan maklumat yang melarang penduduk mengedarkan uang NICA.

29 OKTOBER

1946

Pemerintah RI menetapkan berlakunya ORI.

30 OKTOBER

1946

Pukul 00:00 ORI menjadi mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Kawalan ketat mengiringi pengiriman itu guna menghindari perampokan di tengah jalan.

1946-47

Persaingan uang NICA dengan uang ORI terus berlangsung.

1947

ORI sulit beredar ke wilayah Jawa Barat dan Sumatra, tokoh-tokoh pro-Republik di daerah tersebut mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan mereka mengeluarkan uang sendiri.

13 DESEMBER

1948

Peraturan Pemerintah menyebut masa berlaku ORIDA akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan. Ada 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA hingga akhir 1949.

1949

Pemerintah Belanda meminta agar uang NICA dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah selama perundingan Konferensi Meja Bundar. Sri Sultan Hamengkubuwono menolak dan menawarkan usulan pihak Belanda melakukan survei guna mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Survei membuktikan bahwa masyarakat memilih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah.

1 JANUARI

1950

Mata uang Republik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan oleh De Javasche Bank bersamaan dengan pengesahan RIS dalam Konferensi Meja Bundar.

1 MEI

1950

ORI dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung.

17 AGUSTUS

1950

pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar. Penggunaan istilah mata uang RIS juga dihentikan dan berakhir, walau sebetulnya mata uangnya sama-sama Rupiah.

DESEMBER

1951

De Javasche Bank (DJB) resmi dinasionalisasi yang kemudian menjadi Bank Indonesia (BI). Setelah BI berdiri, terdapat dua macam uang Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yang diterbitkan pemerintah (Kemenkeu) dan BI.

1968

Demi keseragam dan efisiensi, BI diberikan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.

Dari Kopi Sampai ORI

Pabrik NIMEF di Malang berhasil mencetak Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang pertama. Pabrik besar dan canggih ini berawal dari rumah sangrai kopi.

Di masa perang, bukan hal mudah bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka untuk membuat mata uang sendiri. Kesukaran muncul mulai dari sulitnya mencari bahan baku hingga mencari percetakan. Upaya mencetak uang di Surabaya gagal. Begitu juga di Jakarta.

Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken atau disingkat NIMEF, sebuah pabrik percetakan di Kendalpayak, Malang, Jawa Timur, menjadi penyelamat. Lokasinya jauh dari medan-medan pertempuran yang sedang berkobar di berbagai kota. Wilayah ini juga dikuasai Republik.

Menurut Fendy E. W. Parengkuan dalam biografi A.A. Maramis, S.H., pabrik NIMEF sempat menjadi tempat pembuatan bahan peledak semasa pendudukan Jepang. “Dengan berkuasanya pemerintah RI maka Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis

mengubah nama pabrik menjadi PKPN (Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara) Kendalpayak Malang,” tulis Fendy.

Setelah NIMEF ditunjuk untuk mencetak uang, Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia segera mencari bahan-bahan. Kebutuhan kertas dibantu oleh Serikat Buruh Kertas Padalarang. Mesin pembuat kertas berhasil dibawa dari pabrik Padalarang sebelum dikuasai tentara Belanda.

Sementara itu, bahan-bahan kimia didatangkan dari Jakarta dan dari laboratorium pabrik-pabrik gula di Jawa Timur. Dengan bahan yang tersedia dan mesin-mesin percetakan NIMEF, uang Republik pun berhasil diproduksi.

Pabrik NIMEF di Malang, juga yang berada di Solo dan Yogyakarta, yang berhasil mencetak uang kemudian dijaga ketat. Untuk mengedarkannya, uang dimasukkan ke dalam besek, lalu dimasukkan lagi ke karung goni dan diangkut dengan kereta api ke seluruh Jawa. Maka, 30 Oktober 1946, sebagai tanggal emisi pertama ORI, kemudian ditetapkan sebagai Hari Oeang.



Aktivitas pekerja di pabrik NIMEF

Foto Historia

NIMEF punya andil penting dalam lahirnya mata uang rupiah. Namun, siapa sangka NIMEF berawal dari rumah sangrai kopi yang tumbuh menjadi salah satu pabrik paling besar di Hindia Belanda dan paling canggih pada masanya.

Produksi kemasan

Cerita bermula pada 1901. Dua orang Belanda, L Schol dan H. Janssen van Raay, mendirikan rumah sangrai kopi Eerste Nederland Indie Koffiebranderij (ENIK) di Malang. Dengan menyewa sebuah rumah kecil-kecilan.

Perseroan terbatas ENIK ini hendak memasarkan kopi panggang dan kopi bubuk. Produknya hanya diedarkan di pasar-pasar. Perusahaan ini baru benar-benar beroperasi pada tahun 1902. Namun, bisnis kopi ini ternyata berkembang pesat dalam waktu singkat.

Modal perusahaan yang awalnya 26.900 gulden meningkat hampir dua kali lipat menjadi 50.000 gulden pada 1904. Pada tahun itu juga, perusahaan membeli tanah di Kendalpayak, sebuah desa di Malang.

Mesin cetak dan mesin potong kemudian dibeli untuk memproduksi kemasan kertas yang sebelumnya dipasok dari Eropa. Dari sinilah, perusahaan mulai merambah ke produksi kemasan kertas. Pada 1908, NIMEF kembali melebarkan sayap. Dari kemasan kertas, mereka mulai memproduksi kemasan kaleng.

“Akhirnya... karena segala sesuatu sudah sedia, maka karena indahnya, orang lain pun suka pula memakai yang demikian, lalu perusahaan itu tidak saja membikin dalam pabriknya untuk dipakai sendiri, tapi juga untuk orang

lain,” tulis wartawan kenamaan Parada Harahap dalam *Indonesia Sekarang*. Pada 1939-1940, Parada Harahap keliling Jawa dan mengunjungi beberapa pabrik besar, termasuk NIMEF.

Pesanan berdatangan dari berbagai perusahaan. Menurut *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, 1 Agustus 1927, hampir semua kebutuhan kemasan industri di Jawa bergantung pada perusahaan ini. Meski demikian, saat itu bahan mentah masih bergantung pada Amerika Serikat dan Jepang.

“Lambat laun timbul kekurangan tempat, sehingga pada tahun 1911 dibuatlah bangunan pabrik baru,” tulis *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*.

Dari bisnis sampingan, produksi kemasan kemudian dipisah dari produksi kopi. Perusahaan khusus kemasan lalu didirikan pada tahun 1918 dan diberi nama *Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken* atau disingkat NIMEF.

Besar dan canggih

Masih di 1918, Direktur NIMEF melawat ke Eropa untuk melihat perusahaan-perusahaan sejenis. Mesin-mesin dari Eropa kemudian didatangkan. Areal pabrik diperluas dan sekitar 400 orang Indonesia dipekerjakan. Mereka tinggal di satu kampung di sekitar pabrik.

Gedung pabrik yang baru ini mulai beroperasi awal 1920. “Modal saham yang disetor sudah mencapai NLG 700.000,” tulis *De Indische Courant*, 6 September 1934.

Perusahaan ini memproduksi berbagai macam kantong kemasan dari karton untuk kebutuhan toko-toko.



Pabrik NIMEF di Malang

Foto Historia

Selain itu, mereka juga memproduksi beragam kotak karton, mulai dari kotak amplop hingga kotak obat.

“Juga kotak-kotak tempat sabun mewah biasanya terlihat dikemas, dan kotak-kotak yang lebih bagus, yang digunakan di toko perhiasan besar untuk memajang benda-benda berharga, dibuat di sini,” tulis *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*.

Tak hanya itu, beragam kebutuhan seperti buku kantor, kartu nama, hingga tiket untuk trem, kereta api dan bioskop pun dicetak di sini. Segala produk yang memungkinkan dicetak pada karton akan diproduksi NIMEF.

Perkembangan pabrik begitu pesat. Mesin cetak perunggu serta dua mesin pengepres kecepatan tinggi yang digerakkan secara elektrik kemudian juga dimiliki NIMEF. Bahkan NIMEF mengembangkan ekspedisi langsung dari gudang pabrik yang terhubung dengan jalur trem uap Malang. Hal ini memungkinkan bongkar-muat yang lebih efisien.

“Perusahaan ini didukung oleh mesin gas dan juga oleh listrik. Sangat menarik untuk bisa melihat-lihat di sini,” tulis *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*.

Dari tahun ke tahun, omzet NIMEF terus meningkat. Pada 1932, ketika

pabrik rokok Faroka dibuka, NIMEF mendapat kontrak untuk memproduksi semua kemasan dan keperluan percetakan lainnya. Mesin dari Eropa kembali dipesan secara khusus untuk kontrak ini.

Pada saat yang sama, NIMEF mengembangkan kemasan timah seperti pelat iklan, kaleng cat, hingga kaleng teh dan minyak. Sementara itu, bagian percetakan karton NIMEF telah menjadi yang terbesar di Hindia Belanda. Selanjutnya, pada 1933, NIMEF mulai melirik Jawa Barat untuk memperluas jangkauan pasar.

“Secara bertahap bisnis mengambil skala besar dan untuk lebih bersaing dengan pabrik pengemasan yang ada di Jawa Barat, pabrik kedua didirikan di Bandung pada tahun 1933 di bawah kepemimpinan H. H. Proper,” tulis *Soerabaijasch Handelsblad*, 17 Juni 1935.

Tahun-tahun berikutnya, NIMEF semakin di depan, baik dari segi teknologi maupun cakupan pasar. Agensi NIMEF kemudian dibuka di Batavia (Jakarta). Mereka juga memiliki toko sendiri bernama Toko NIMEF.

Menurut Parada Harahap, NIMEF memiliki tidak kurang 1.101 pegawai Indonesia dan 40 orang Eropa. Pabrik ini juga memiliki klinik, rumah-rumah pondok, lapangan sepak bola, dan

selalu membantu para pekerjanya yang ingin memiliki rumah dan pekarangan. Sebab, kata Parada Harahap, “NIMEF berpendapat seboleh-boleh kaum buruhnya itu hendaklah merasa betah di sana, turun-menurun sampai kepada anak-cucunya.”

Cagar budaya

Setelah Indonesia merdeka, pabrik NIMEF di Kendalpayak, Malang, dipakai pemerintah Indonesia untuk mencetak ORI. Kiranya dua tahun sejak akhir 1945 NIMEF terus memproduksi ORI. Namun, perannya harus berhenti pada 1947 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I. NIMEF ditinggalkan.

“Pabrik tersebut terpaksa dibumihanguskan tahun 1947 untuk mencegah jatuhnya ke tangan Belanda yang telah memulainya agresinya 21 Juli 1947. Semua uang yang telah tercetak bersama barang-barang berharga lainnya dibawa mengungsi ke Yogyakarta di bawah pengawasan yang ketat,” tulis Fendy

Di lahan bekas pabrik NIMEF di Malang kini berdiri kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara bangunan eks Toko NIMEF di Jalan Agung Salim sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Malang.*

Menahan Laju Uang Merah

Belanda membawa dan mencetak mata uang sendiri ketika berupaya kembali menjajah Indonesia. Mata uang terlarang bagi kaum nasionalis di masa revolusi.

Dengan beredarnya uang NICA, perang mata uang terjadi di Indonesia

Foto Historia

Sekalipun sudah angkat kaki karena kalah melawan Jepang, Belanda berpikir bakal kembali menguasai Indonesia. Segala persiapan dilakukan termasuk mencetak mata uang Hindia Belanda yang baru. Uang kertas tersebut dicetak pada 1943 dalam sembilan pecahan dari 50 sen hingga 500 gulden/rupiah.

“Pada saat itu pemerintah telah memperkirakan De Javasche Bank (DJB) sulit untuk langsung berfungsi setelah mereka di wilayah Hindia Belanda,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia (BI) dalam situs resminya.

Dalam uang tersebut tercantum nilai gulden dalam bahasa Belanda dan nilai rupiah dalam bahasa Indonesia. Dalam Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia, tim peneliti BI mengatakan, penggunaan kata “rupiah” pada uang NICA merupakan upaya Belanda untuk menarik hati rakyat Indonesia. Dengan beredarnya uang NICA, perang mata uang terjadi di Indonesia.

Harapan itu terwujud. Pendudukan Jepang berakhir. Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda tetap kembali ke wilayah bekas koloninya dengan membonceng Sekutu. Tak hanya membawa tentara sipil (NICA), Belanda juga membawa uang NICA. Masyarakat menyebutnya “uang merah” karena pecahan 50 sen dan 10 rupiah yang banyak digunakan, berwarna merah.

Para petinggi NICA seperti Charles van der Plas dan van Mook semula berpikir mengedarkan uang NICA berisiko tinggi bagi rencana menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Namun, para pemimpin di Belanda pada 30 September 1945 memutuskan menarik mata uang rupiah Jepang dan menggantinya dengan uang NICA.

“Akhirnya, ada semacam persetujuan dari van Mook untuk mengedarkan mata uang NICA di luar Jawa dengan kurs penukaran 3 sen uang NICA untuk setiap 1 rupiah uang Jepang. Sedangkan peredaran uang NICA di Jawa dilakukan kemudian,” kata sejarawan Mohammad Iskandar dalam “Oeang Republik’ dalam Kancan Revolusi” pada Jurnal Sejarah Vol. 6 No. 1, Agustus 2004.

Indonesia bereaksi terhadap peredaran uang NICA tersebut. “Uang ini kita anggap tidak laku; janganlah diterima, supaya jangan timbul inflasi di sini,” demikian maklumat pemerintah Indonesia pada 2 Oktober 1945 dalam arsip Sekretariat Negara RI No.48

koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Ditodong senjata

Peredaran uang NICA berjalan mulus kecuali di Jawa dan Sumatra. Muncul perlawanan dari rakyat yang mematuhi maklumat pemerintah Indonesia.

Pada 3 Oktober 1945, para pelajar sekolah menengah di Yogyakarta keluar-masuk kampung untuk menyita mata uang NICA. Dua hari kemudian, kaum buruh mengadakan rapat raksasa untuk menyatakan kebulatan tekad mendukung Republik Indonesia. Di Jakarta, banyak pedagang pribumi menolak menjual barang kepada orang Belanda dan enggan dibayar dengan uang NICA. Begitu pula di Semarang. Penolakan juga dinyatakan kaum Republikan di Bandung. Tidak jarang arena jual beli berubah menjadi arena perkelahian (Berita Indonesia, 7 Oktober 1945).

Pihak Sekutu turun tangan mengatasi perang mata uang tersebut. Pada 6 Oktober 1945, Brigjen Bethell selaku komandan penanggung jawab Sekutu menyatakan bahwa hanya uang rupiah Jepang yang berlaku sebagai alat tukar. Namun, sikap Sekutu tak konsisten. Memasuki tahun 1946, kebijakan Sekutu cenderung menguntungkan Belanda.

Belanda pun tetap bersiasat memperluas peredaran uang NICA. NICA memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Jakarta pada 10 Oktober 1945. Bank-bank Jepang ditutup. DJB dihidupkan kembali dan bertugas sebagai bank sirkulasi.

Pada 6 Maret 1946, uang NICA emisi 2 Maret 1943 beredar resmi. Pada bulan berikutnya, DJB membuka kembali kantor-kantor cabangnya di kota yang diduduki NICA. Di daerah-daerah pendudukan, uang NICA

menjadi alat pembayaran sah.

Pada tahun 1946, DJB mengeluarkan uang kertas DJB emisi darurat 1946, terbit dalam pecahan 5, 10 dan 25 gulden/rupiah. “Ketiga pecahan ini terus beredar di wilayah Indonesia hingga nantinya ditarik dari peredaran sehubungan dengan kebijakan Gunting Sjafruddin pada 1950,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

Banyaknya mata uang yang beredar membingungkan rakyat kecil. Di Makassar misalnya, seperti dicatat Pramoedya Ananta Toer, dkk dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1, rakyat hanya mau menerima uang rupiah cetakan Jepang. Tetapi para pedagang kadang dipaksa dengan todongan senjata untuk menerima uang NICA. Menggunakan uang NICA pun sama nahasnya. Pejuang atau Tentara Republik akan mencap siapa saja yang menyimpan uang NICA sebagai mata-mata Belanda.

Perang mata uang

Pada 15 Maret 1946, pihak Republik mengeluarkan maklumat yang melarang penduduk mengedarkan uang NICA. “Barang siapa menyimpan atau mengedarkan mata uang NICA akan mendapat hukuman berat” (majalah Pantja Raya, 1 April 1946). Tak pelak, kehadiran uang NICA menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Setelah Bank Nasional Indonesia (BNI) berdiri pada 5 Juli 1946, beberapa mata uang seperti uang DJB, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah pendudukan Jepang ditarik dari peredaran. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memegang uang maksimal 50 rupiah Jepang untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemudian, Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No.SS/1/25 tanggal 29 Oktober 1946 menetapkan berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI). Pada 30 Oktober



BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai 'syarat' bagi Indonesia untuk menjadi sebuah

Foto
Historia

1946 pukul 00.00, ORI menjadi mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Kawalan ketat mengiringi pengiriman itu guna menghindari perampokan di tengah jalan.

Kehadiran ORI menandai babak baru perang mata uang. ORI mulai memasuki daerah-daerah pendudukan melawan uang NICA. Rakyat menyambut antusias. Umpamanya, tukang becak di Jakarta lebih memilih dibayar ORI senilai 20 sen ketimbang 1 rupiah uang NICA. Di Pasar Tanah Abang, harga ayam potong harganya f2 uang NICA tetapi para pedagang pribumi malah menawarkan dagangannya senilai Rp 50 ORI.

NICA tak tinggal diam, pada 15 Juli 1947, setelah hampir semua uang NICA

beredar, DJB mulai mencetak uang kertasnya sendiri (post-war banknotes). Melalui Ordonansi 20 November 1947 keluarlah uang kertas pemerintah Belanda dengan tanggal emisi Batavia/Djakarta, Desember 1947, dengan pecahan 10 sen dan 25 sen. “Uang kertas pemerintah ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia serta dicantumkan kata ‘INDONESIA’ sebagai penerbit uang,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

Kenyataan pahit

Persaingan uang NICA dengan uang ORI terus berlangsung. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta menjelang akhir 1949, Menteri Negara/Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono menetapkan baik ORI dan uang NICA berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. “Kebijakan itu diambil karena

pada hakikatnya pemerintah RI sangat kekurangan uang,” tulis Darsono dkk. dalam Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia.

Semula pemerintah Belanda meminta agar uang NICA dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah selama perundingan Konferensi Meja Bundar. Sultan menolak dan menawarkan usulan nan jitu. Dia mempersilakan pihak Belanda melakukan survei guna mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut.

Pihak Belanda harus menerima kenyataan pahit. Survei membuktikan bahwa masyarakat memilih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Uang NICA tak sanggup menyumpal warga Republik Indonesia yang ingin merdeka dan berdaulat.*

Gedung A. A Maramis

Saksi bisu sejarah pra kemerdekaan ini masih berdiri kokoh, meski beberapa bagian gedung ini mesti ditopang besi pembantu. Gedung monumental ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tahun 1809.

Awalnya bangunan bergaya empire ini dirancang sebagai istana, namun karena keterbatasan biaya dialihfungsikan sebagai kantor besar urusan keuangan negara. Gedung tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia pada tahun 1950, dan dilanjutkan pemanfaatannya sebagai kantor Kementerian Keuangan RI.



Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah ORIDA

Peredaran Oeang Republik Indonesia dibendung Belanda dengan berbagai cara. Pemerintah daerah berinisiatif mencetak mata uang sendiri.

Setelah resmi beredar pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia berupaya mendistribusikan Oeang Republik Indonesia (ORI) secara hati-hati ke berbagai wilayah di Jawa dan Madura. Dari percetakan, petugas memasukkan uang itu ke dalam keranjang-keranjang bekas dan membawanya ke kereta api. Di dalam kereta, pemerintah menempatkan petugas bersenjata lengkap.

Pemerintah Indonesia menerapkan prosedur itu untuk memastikan uang itu bebas dari gangguan tentara NICA. Saat itu, Belanda sedang gigih menguasai kembali Indonesia. Mereka melakukan segala cara untuk memperlemah kedudukan Republik. Strategi mereka menyasar pula segi ekonomi moneter. Antara lain dengan memproduksi mata uang yang dikenal dengan “uang NICA” dan mencegah peredaran ORI.

“Ada upaya pihak Belanda-NICA untuk mengacaukan perekonomian dengan cara memalsukan ORI dan memasukkan dan mengedarkan uang NICA (uang merah) ke wilayah RI,” ungkap Mohamad Iskandar dalam “Oeang Republik Dalam Kancah Revolusi” termuat di *Jurnal MSI*, Vol 6, Tahun 2004.

Masyarakat ikut mendukung peredaran ORI di daerah tentara NICA bercokol. Misalnya di wilayah Cibinong dan Bogor, Jawa Barat. Di sini mereka bertaruh nyawa demi mengedarkan ORI.

“Perjuangan rakyat terutama tentang memasukkan uang ORI ke daerah yang diduduki oleh Belanda masih juga dilakukan meskipun seribu satu macam gangguan, kadang-kadang dengan siksaan, pembunuhan, dan penghinaan, sebagai tanda kesetiaan kepada Pemerintah Republik,” catat arsip Markas Tentara Brigade Siliwangi, 9 Desember 1946.

Memasuki 1947, situasi di sejumlah perbatasan wilayah Republik dan Belanda memanas. Pertempuran antara pejuang pro-Republik dan tentara seringkali meletus. Distribusi ORI ikut tersendat.

Keadaan makin parah ketika Belanda menggelar Agresi Militer I yang menyebabkan kedudukan Republik di sejumlah wilayah goyah. Belanda berhasil merebut sejumlah wilayah Republik. Hal ini diperkuat oleh Perjanjian Renville pada Januari 1948.

Sjafruddin Prawiranegara, orang yang mengusulkan agar pemerintah RI mengeluarkan ORI, telah menduga bahwa peredaran ORI tak akan berjalan mudah. Dia mengatakan bahwa keluarnya ORI bukanlah akhir perjuangan.



Rumah gadang khas Sumatera Barat

Foto Historia

“Keluarnya Uang Republik bukan berarti bahwa kita nanti boleh goyang kaki dan hidup senang-senang saja, bahkan sebaliknya sekaranglah baru tiba saatnya untuk bekerja segiat-giatnya membangun secara teratur dan sistematis,” kata Sjafruddin kepada Ajip Rosidi dalam *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*.

Inisiatif daerah

Ketika mengetahui ORI sulit beredar ke wilayah Jawa Barat dan Sumatra, tokoh-tokoh pro-Republik di daerah tersebut mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan mereka mengeluarkan uang sendiri.

Selama menunggu persetujuan pusat, pemerintah Sumatra mengambil inisiatif mencetak uang sendiri dengan nama Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatra (ORIPS). Emisi pertama tertanggal 11 April 1947, ditandatangani Maklumat Gubernur Sumatra Tengku Mohammad Hasan. Penerbitan uang ini berlandaskan Maklumat Gubernur Sumatra Tengku Mohammad Hasan No. 92/K.O. tertanggal 8 April 1947. ORIPS menjadi Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) pertama di Indonesia.

Pemerintah pusat mengetahui dan mendukung penuh penerbitan ini. Nilai tukarnya setara dengan 1 ORI di Jawa. Tapi peredarannya terhadang blokade tentara NICA.

Agresi militer Belanda I yang melanda Pematang Siantar membuat seluruh kegiatan pencetakan ORIPS dipindahkan ke Bukittinggi. Namun dari Bukittinggi inilah pemerintah Republik menerbitkan ORIPS untuk berbagai wilayah lainnya di Sumatra.

“Khusus untuk emisi Bukittinggi, tercatat hingga 1948, ada 13 ORIPS yang diedarkan di Sumatera,” tulis Sri Margana dkk dalam *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953*.

Memasuki Agustus 1947, pemerintah Asahan di Sumatra menerbitkan alat pembayaran berupa bon. “Secara harfiah bon dapat diartikan sebagai bukti tertulis berupa kertas kecil mengenai peminjaman sejumlah uang atau barang,” catat Darsono dkk. dalam *Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*.

Menyikapi penerbitan uang

Jam Gadang di Bukit Tinggi

Foto Historia

atas inisiatif pemerintah setempat, pemerintah pusat secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1947, 26 Oktober 1947. Isinya membolehkan pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

“ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut,” tulis Darsono dkk.

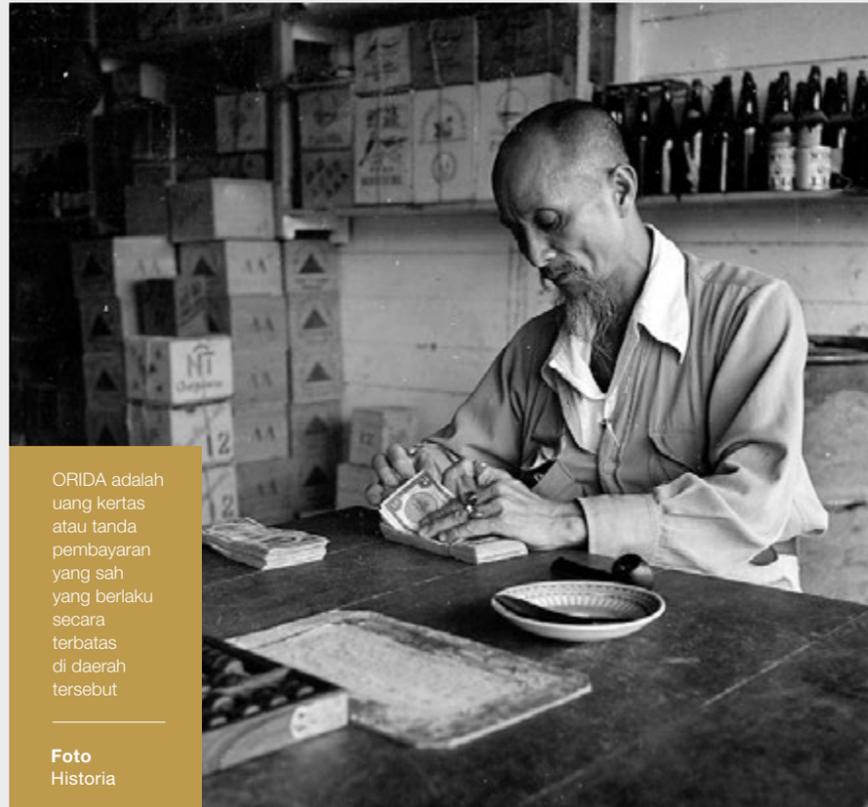
Bukan hanya uang

Peraturan Pemerintah No. 19/1947 memperjelas kedudukan uang daerah buatan pemerintah setempat. Karena itu, setelah peraturan itu keluar, pemerintah daerah di Jawa dan Sumatra tanpa ragu menerbitkan alat-alat pembayaran sendiri. Bentuknya tak hanya uang. Ada juga bentuk bon, surat tanda penerimaan uang, kupon gerilya, kupon getah, surat mandat, dan tanda pembayaran.

Sebut saja mata uang lokal seperti Uang Republik Sumatera Utara (URISU), Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli (ORITA), Uang Republik Daerah Djambi (URIDJA), Uang Republik Indonesia Daerah Aceh (URIDA), Uang Mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan daerah Sumatra Selatan, hingga “Oeang Kertas Darurat untuk Daerah Banten” (OERIDAB).

“ORIDAB merupakan ORIDA pertama yang diterbitkan di Pulau Jawa dengan emisi Serang yang terbit pada Desember 1947,” tulis Sri Margana dkk.

Di Yogyakarta, terbit Surat Tanda Penerimaan Uang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hal yang sama diterbitkan di Surakarta dan ditandatangani Kepala Pemerintah Militer Daerah Surakarta.



ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut

Foto
Historia

Selain uang yang dikeluarkan oleh otoritas, beragam kelompok masyarakat menerbitkan alat pembayarannya masing-masing. Seperti dilakukan komunitas pedagang Tionghoa di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Asahan, yang menerbitkan alat pembayaran sendiri atas izin dari pemerintah setempat.

Terkait dengan masa berlaku ORIDA, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 76/1948 pada 13 Desember 1948 yang menyebut masa berlaku ORIDA akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan. Mohamad Iskandar mencatat, ada 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA hingga akhir 1949.

Dalam situasi perang, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. J. Soedradjad Djiwandono dkk dalam *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959* memperkirakan peningkatan yang cukup signifikan. Peredaran ORI dan ORIDA pada 1946 sebesar Rp323 juta

diperkirakan meningkat menjadi Rp6 miliar pada akhir 1949.

Selain sulitnya peredaran ORI, penerbitan ORIDA memang dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan lokal. Namun menurut Sri Margana dkk, seperti yang terjadi pada ORI, kebanyakan dari ORIDA ini mengalami inflasi yang cukup serius dan penurunan nilainya cukup signifikan.

Kendati demikian, penerbitan berbagai jenis mata uang dan bentuk ORIDA telah membantu Republik tetap bertahan menghadapi serbuan uang NICA di daerah. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap ORIDA membuktikan posisi kuat Republik di berbagai daerah pendudukan Belanda.

Kesepakatan Indonesia dan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949 mengakhiri ORI dan ORIDA. Uang-uang itu harus ditarik setelah Indonesia dan Belanda sepakat mengeluarkan uang baru melalui De Javasche Bank, bank sentral Hindia Belanda.*

Berbeda-Beda Tetap Satu Juang

Daerah menerbitkan uang lokal dengan beragam bentuk dan ciri. Tujuannya sama: menegakkan kedaulatan.

Sejak resmi diterbitkan dan diedarkan pada 30 Oktober 1946, Oeang Republik Indonesia (ORI) mengalami tak sedikit hambatan.

Netherlands Indies Civil Administration (NICA) berupaya mempersempit peredaran ORI atau “uang putih”. Mereka menutup jalan perbatasan dan merazia setiap pembawa “uang putih” di banyak wilayah Jawa dan Sumatra.

Peredaran “uang putih” pun mampat. Pemenuhan gaji pegawai dan anggaran perjuangan terganggu. Tapi rakyat Republik tak hilang akal.

“Mereka bekerja keras menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) sebagai alat tukar sementara,” kata Suwito Harsono, kolektor ORIDA, pakar numismatik, dan penulis buku *ORIDA: Oeang Republik Indonesia Daerah 1947-1949*.

Michell Suharli, kolektor ORIDA lainnya dan *co-author* buku ORIDA, menambahkan bahwa ORIDA berkedudukan sebagai salah satu alat perjuangan rakyat. “Para pejuang

negeri berjuang dengan senjata dan ORIDA menyertai perjuangan itu sebagai alat tukar rakyat yang menolak menggunakan uang terbitan penjajah,” kata Michell.

ORIDA terbit dan beredar sepanjang 1947-1950 di wilayah Sumatra dan Jawa. Legalitasnya terjamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/1947, 26 Oktober 1947. PP tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara yang sah. Pemerintah pusat juga menjamin seluruh penerbitan tersebut dan mata uang daerah yang diterbitkan dapat ditukarkan dengan ORI.

Namun sebelum peraturan itu keluar, ORIDA di Pematang Siantar, Sumatra Utara, lebih dulu beredar pada April 1947.

Yang Pertama

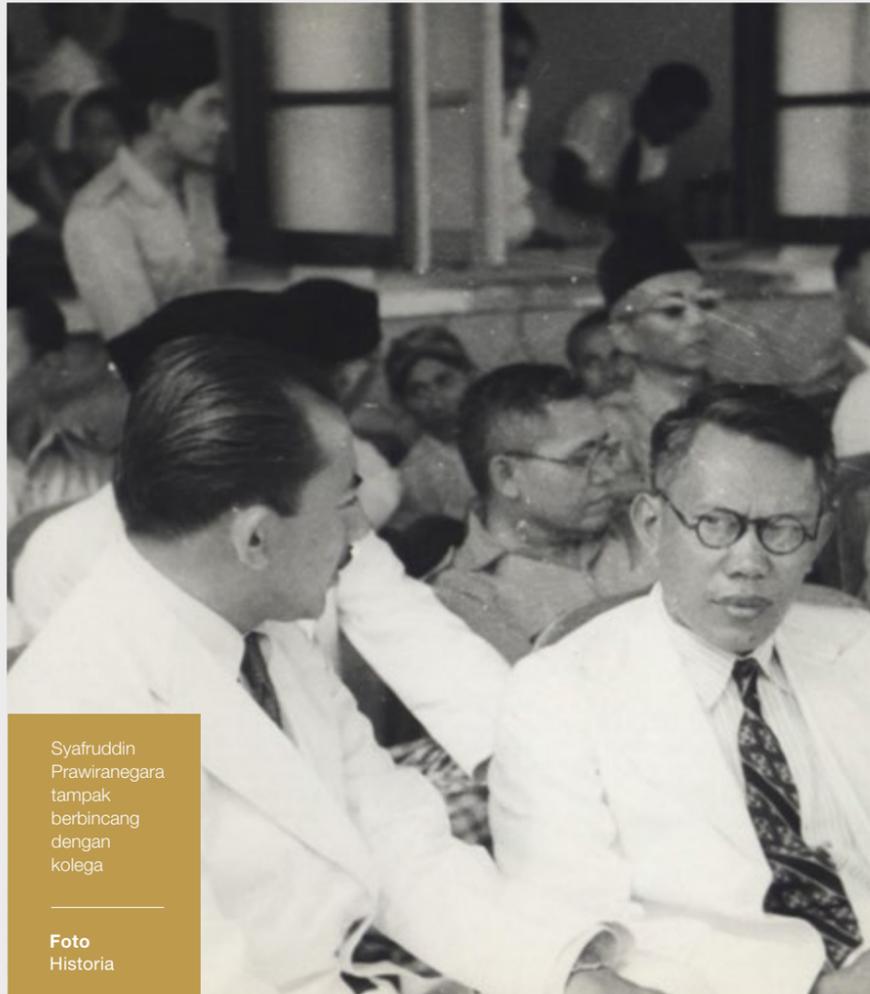
Tengku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatra, mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mengizinkan mengeluarkan uang

bikinan sendiri secara terbatas. “Merespons permintaan ini, Sjafruddin memberikan usul agar Sumatra mencetak *promesse* ‘surat janji’. Namun, Hasan memiliki pandangan lain. Menurutnya uang kertas akan jauh lebih efektif daripada *promesse*,” catat Suwito dan Michel dalam *ORIDA*.

Setelah berdiskusi panjang lebar, Sjafruddin memuluskan permintaan Hasan. Dengan berlandaskan Maklumat Gubernur Sumatra Tengku Mohammad Hasan No. 92/K.O, 8 April 1947, ORIDA pertama di Indonesia itu pun dicetak dan diedarkan.

ORIDA di Sumatra dikenal dengan Oeang Republik Indonesia Sumatra (ORIPS). Nilainya setara dengan 1 ORI di Jawa. Ada empat pecahan ORIPS di Pematang Siantar: Rp1, Rp5, Rp10, dan Rp100. “Masing-masing nilai uang memiliki warna yang berbeda, ada yang berwarna biru dan hijau,” ungkap Darsono dkk. dalam *Berjuang dengan Uang*.

ORIPS memiliki tanda pengaman dan nomor seri untuk menjamin



Syafruddin Prawiranegara tampak berbincang dengan kolega

Foto
Historia

keasliannya. Ketika itu pemalsuan uang telah marak. Biasanya dilakukan NICA untuk menggoyang fondasi moneter Republik. Desain ORIPS sederhana, hanya menggambarkan Sukarno, gunung, aktivitas sawah, dan nilai uang dengan satu warna (*monochrome*).

Saat itu belum ada ketentuan khusus mengenai desain uang. Akibatnya corak, ukuran, jenis huruf, bentuk angka, jarak antara huruf dan angka, dan aspek visual lainnya bisa berbeda. Yang pasti, setiap uang harus memiliki tanda pengaman, nomor seri, dan tanda tangan tokoh setempat sebagai bukti legalitas. Tanda tangan tokoh itu jugalah yang membedakan ORIDA dari ORI. “Yang tak paham, bingung membedakan ORI dan ORIDA,” kata Suwito.

40 Tempat

Pencetakan ORIPS semula di Pematang Siantar, lalu pindah ke Bukittinggi pada 1948. Ini sesuai dengan perintah Sukarno agar Panglima Divisi IX di Bukittinggi mencetak ORIPS. “Untuk memerintahkan kepada Panglima Divisi IX supaya percetakan Divisi IX menerima dan mengerjakan mencetak uang buat Sumatra atas perintah Kommissariat Pemerintah Pusat,” perintah Sukarno dalam Arsip Kementerian Pertahanan No 528, 5 Juli 1948.

Berpindahnya pencetakan ORIPS membawa perubahan pada sisi desain. Beredar di Bukittinggi, ORIPS menampilkan gambar tokoh atau ikon budaya setempat seperti Tuanku Imam Bonjol dan rumah gadang. Misalnya

dalam pecahan Rp10.

Arif Budiman dalam “Uang Kertas Minangkabau: Sebuah Kajian Seni Rupa dan Makna”, menyebut sosok Imam Bonjol digambar dengan teknik garis dan asir. “Sehingga sosok tersebut kelihatan jelas, kasatmata dengan sosok aslinya,” catat Arif.

Dalam uang tersebut, wajah Imam Bonjol tampak marah, sinis, dengan sorot mata tajam. Gambaran ini melambangkan kemarahan terhadap tindakan Belanda menjajah kembali Indonesia. Arif menganalisis tampilnya Imam Bonjol dalam bentuk uang sebagai material informasi dan alat provokasi masyarakat.

Lazimnya, ORIDA menampilkan identitas khas suatu daerah tempat uang itu terbit dan beredar. Namun, dalam sejumlah ORIDA pengaruh Jawa masih muncul dalam bentuk ilustrasi candi Borobudur pada 5 rupiah ORIPS emisi Bukittinggi, figur wayang perempuan pada pecahan 5 rupiah emisi Riau 1947.

Peredaran ORIPS emisi Bukittinggi tak bisa menyeluruh ke Sumatra. Tentara NICA menguasai sejumlah wilayah sehingga pemerintah daerah lain yang pro-Republik menerbitkan uangnya sendiri pula.

Selain mata uang, di beberapa daerah di Sumatra beredar kupon sebagai alat pembayaran yang sah. Kupon tersebut beredar di Aceh, Riau, Palembang, dan daerah lainnya. Sementara pemerintah Asahan pada Agustus 1947 menerbitkan alat pembayaran berupa bon yang dapat ditukarkan dengan uang.

Bon di Asahan memiliki nilai beragam, antara 10 sen sampai 100.000 ORIPS. Sisi depannya dimuati beragam gambar, bergantung pada nilai bonnya. Kebanyakan berupa bunga, pemandangan alam, dan cap bupati. Warnanya antara lain hitam, merah, hijau, dan biru.

Bon terdapat pula di Barus, Membang Moeda, Laboehan Bilik,

Rantau Prapat, Lima Poeloeh, dan Dolok Nanggar. Yang menarik, bon di Lima Poeloeh menggunakan aksara Tiongkok. “Realitas ini menunjukkan bagaimana masyarakat pribumi dan Cina bekerja sama dalam berjuang menegakkan kedaulatan Republik Indonesia melalui URIDA,” ungkap Darsono dkk.

Menurut penelusuran Suwito dan Michell, ORIPS di Sumatra beredar di lebih dari 40 tempat. Jenis dan bentuk ORIPS-nya pun berbeda-beda. Dari uang, kupon, bon, surat, hingga mandat. Hal serupa juga tersua di Jawa.

Gotong royong

ORIDA di Jawa kali pertama terbit di Banten pada 11 Agustus 1948. Uang ini beredar atas persetujuan K.H. Achmat Chatib, Residen Banten. Wilayah peredarannya meliputi Tangerang, Jasinga, dan Lampung Selatan.

Pencetakan ORIDA Banten penuh perjuangan. Semua bahan dan alat pencetaknya diselundupkan dari luar Banten. Ini bisa terwujud melalui kerja gotong royong antara rakyat dan pemimpin Banten. Sri Margana dkk dalam *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945-1953* menyebut bahan klise uang ini dibuat dari sawo kecil di percetakan milik Abdurrojok.

ORIDA Banten terbit setelah tentara Belanda menguasai sebagian besar perbatasan di Jawa Barat dan memblokir pesisir Banten sehingga Banten terisolasi.

“Belanda berharap dengan memblokir lewat ekonomi dapat menimbulkan keadaan sosial yang buruk dan kekurangan bahan impor,” sebut Lasmiyati dalam “Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (URIDAB) 1945-1949” di jurnal *Patanjala* Vol 4, No 3, 2012.

ORIDA Banten terdiri atas pecahan Rp1, Rp5, Rp10, dan Rp25. Uang bernilai Rp1 dibuat dari bahan kertas berwarna dasar coklat muda. Gambar depannya berupa nilai uang, cangkul, palu, dan

tulisan “DARURAT TANDA PEMBAJARAN JANG SAH”. Tanda tangan Achmad Chatib tertera dalam aksara arab.

Di belakangnya termuat ketentuan hukuman pidana bagi pemalsu uang.

Yang menarik, pada pecahan Rp5, gambar ikon lokal disertakan seperti kubah Masjid Agung Banten, senjata debus, dan keris. Di sudut kanannya termaktub tanda tangan residen Banten dan empat unggas.

Di Surakarta terbit surat tanda penerimaan uang. Masing-masing surat itu berbeda ukuran. Keterangan dalam buku Suwito dan Michell menunjukkan bahwa semakin besar nilai uangnya, semakin besar pula ukurannya. Misalnya surat tanda penerimaan uang emisi Surakarta 1 November 1948 dengan nominal Rp1, ukurannya hanya 58 mm x 93 mm. Sedangkan untuk emisi yang sama dengan nominal Rp5, berukuran 75 mm x 114 mm.

Corak lokal tampak pada surat tanda penerimaan uang emisi Surakarta 1 November 1949. Ada ilustrasi kepala Kala pada bagian bawah surat. Sementara pada nominal Rp25 untuk emisi tanggal yang sama, muncul ilustrasi bangunan candi pada bagian bawahnya. Selain itu, pada nominal Rp10 tersua ilustrasi banteng menanduk harimau.

Menurut Sri Margana, ilustrasi banteng dan kerbau kerap muncul dalam ORIDA di Jawa. “Kerbau demikian pula dengan banteng, merupakan simbol utama yang digunakan untuk mempersonifikasikan rakyat, melawan harimau yang melambangkan penjajah Belanda,” terang Sri Margana.

Sementara itu, dalam ORIDA berbentuk bon, figur panakawan Petruk muncul bersama burung garuda. Ini terlihat pada nominal Rp2,5 emisi 17 Agustus 1948. Figur wayang dan garuda telah digunakan dalam uang kertas terbitan zaman kolonial dan Jepang. Tapi dalam ORIDA, pemaknaan garuda menemukan pemaknaan baru.

Sebab garuda menjadi lambang negara Indonesia.

Hambatan

Keberadaan ORIDA jelas menambah repot Belanda. Mereka berusaha membendung peredaran ORIDA. Di Banten, misalnya, beberapa hari setelah agresi militer II, Belanda merampas ORIDA Banten pecahan Rp100. Selain itu, Belanda merampas seluruh klise pembuatan uang. Sejak itu, Belanda memblokir peredarannya.

ORIDA Banten mulai menghilang dari pasaran pada Februari 1949. Akibatnya orang-orang di pasar harus membarter untuk memperoleh barang kebutuhan. Mereka tak mau bertransaksi menggunakan uang NICA.

Keadaan serupa terjadi di banyak wilayah Jawa. Pemerintah daerah berhasil menerbitkan berbagai bentuk ORIDA seperti uang, bon, kupon, surat, dan mandat. Tapi peredarannya tetap menemui banyak hambatan. Kekuatan militer Belanda ikut mempengaruhi cepat-lambatnya peredaran ORIDA di Jawa.

Yang pasti, ORIDA di Jawa memperoleh tempat di masyarakat. Perang tak hanya dilakukan lewat senjata dan diplomasi, melainkan juga menggunakan uang. Inilah peran dan makna ORIDA yang sering dilupakan orang.

Menurut Suwito, masih banyak aspek ORIDA yang belum terungkap di luar desain dan pemaknaannya. “Siapa yang mendesain, siapa yang memberi perintah membuat uang tersebut, percetakannya di mana, data-data dokumen tentang uang tersebut harus dicari. Agar kita tak menduga-duga,” kata Suwito. Ini karena ORIDA sulit diperoleh pada masa sekarang.

“Sebagian besar ORIDA itu adalah sangat langka. Jangan lagi meriset. Mendapatkannya saja sulit,” kata Suwito.*

UANG NUSANTARA

DARI MASA KE MASA

Uang telah digunakan sebagai alat pembayaran di Nusantara sejak zaman kuno. Berbagai jenis uang telah diterbitkan seiring dengan bergantinya kekuasaan dari era penjajahan sampai pasca kemerdekaan. Dimulai dari uang kuno zaman kerajaan sebelum abad 18, uang Gulden (1930 - 1945), uang Jepang (1945-1946), uang ORI (1946), uang NICA (1946-1949) hingga uang ORIDA (1947-1949).

Uang kuno zaman kerajaan sebelum abad 18



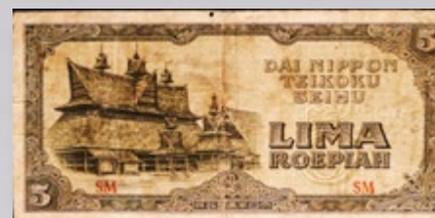
Uang gulden Hindia Belanda



Uang Gulden Transisi



Uang Jepang (1945 - 1946)



Uang NICA (1946 -1949)



ORIDA (1947-1949)



Oeang Republik Indonesia (ORI) (1946)



Uang RIS



Riwayat Uang RIS

Terbit di tengah kekacauan sirkulasi uang yang beredar di tengah masyarakat. Sukses menyeragamkan mata uang tapi beredar singkat.

Perjuangan sudah menuju titik akhir. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tapi masih ada yang mengganjal. Sejumlah kesepakatan KMB tidak menguntungkan Indonesia.

Menurut The Kian Wie dalam pengantar buku yang disuntingnya, *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*, ada empat masalah kontroversial yang kemudian mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. Dua masalah politik berkaitan

dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan status Irian Barat (Papua). Dua masalah ekonomi menyangkut pengambilalihan utang pemerintah Belanda di Indonesia dan terus beroperasinya bisnis Belanda di Indonesia.

“Mencapai kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi menghadapkan Pemerintah Indonesia pada masalah yang serius. Lantaran tidak dapat mengawasi segmen-segmen penting ekonomi Indonesia, gerak para pembuat kebijakan ekonomi Indonesia sangat terbatas,” tulis The Kian Wie.

Setelah KMB, dimulailah babak

Seseorang menyiapkan uang untuk ditukar

Foto Historia

baru pemerintahan RIS, yang terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara boneka BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg 'Majelis Permusyawaratan Federal') bentukan Belanda selama masa perang. Terbentuknya RIS mempengaruhi sistem keuangan, termasuk penggunaan mata uang.

“Mata uang RIS diberlakukan oleh De Javasche Bank pada Januari 1950 bersamaan dengan pengesahan RIS dalam KMB. Mata uang ini menggantikan ORI,” kata peneliti sejarah ekonomi Servulus Erlan de Robert kepada tim kami. Sesuai kesepakatan KMB, De Javasche Bank (DJB) berfungsi sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Melalui DJB inilah mata uang RIS diterbitkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah.

Penyeragaman mata uang

Pada 1 Januari 1950 terbit uang RIS atau juga disebut “uang federal” atau “uang DJB” dalam pecahan Rp5 dan Rp10 dengan tanggal emisi “Jakarta, 1 Januari 1950” yang ditandatangani Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Uang RIS ini menampilkan gambar Sukarno, presiden RIS, sehingga juga dikenal dengan sebutan “emisi Bung Karno”.

Kendati diterbitkan 1 Januari, uang RIS baru beredar dan digunakan pada bulan-bulan sesudahnya. Hal ini bukan tanpa alasan. “Pemerintah masih dalam proses untuk menciptakan sistem keuangan yang tunggal dengan mempersatukan beraneka ragam uang yang beredar di masyarakat,” tulis Sri Margana dkk. dalam *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953*.

Pada tanggal yang sama, Sjafruddin

mengumumkan bahwa uang kertas RIS menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah RIS. Oeang Republik Indonesia (ORI) dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung 1 Mei 1950. Selama tenggat waktu itu, ORI masih berlaku sebagai alat pembayaran hanya di daerah di mana uang tersebut diproduksi. Penyeragaman mata uang itu dilakukan untuk menghapus peredaran berbagai jenis mata uang dengan nilai tukar berbeda-beda, bahkan banyak pula yang palsu. Selain ORI dan ORIDA, beredar pula “uang NICA”.

Selain itu, Sjarifuddin mencetuskan kebijakan moneter yang terkenal dengan istilah “Gunting Sjarifuddin”. Uang kertas lama DJB dan mata uang Hindia Belanda pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua bagian. Kebijakan ini bertujuan menekan inflasi dan mendorong ekspor dari pelaku usaha dalam negeri.

“Kita potong uang Belanda menjadi dua bagian, sebelah diubah menjadi uang Republik dan sebelah lagi dikonversikan menjadi obligasi keuangan. Jadi tidak, kita dapat dituduh merampok separuh uang rakyat,” tutur Sjafruddin dalam *Pelaku Berkisah*.

Penukaran uang

Tindak lanjut dari penyeragaman mata uang dilakukan pada 27 Maret 1950. Pemerintah RIS memutuskan menukarkan ORI maupun ORI daerah dengan uang RIS. Menurut Sri Margana dkk, kurs penukarannya “f”. 1 RIS setara Rp. 125 ORI, sedangkan untuk ORIDA disesuaikan dengan kondisi tiap mata uang.

Namun, penukaran uang dari



ORI ke uang RIS tidak serta merta berjalan seketika. Di Karesidenan Malang, misalnya, penduduk masih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran. Sementara perusahaan jawatan pemerintah yang mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat hanya menerima pembayaran dalam bentuk uang RIS.

Untuk mengatasi masalah itu, Sekretaris Residen Arwoko mengirim telegram kepada pemerintah RIS pusat di Jakarta untuk meminta dispensasi agar diizinkan menunaikan pembayaran dengan ORI. "Tindakan ini perlu untuk menolong rakyat mendapat barang-barang yang dibutuhkan," kata Arwoko dalam pesan telegramnya yang tersimpan di Arsip Sekneg Yogyakarta No. 160 koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Masa penukaran uang dibatasi hingga 21 Juni 1950. Setiap orang hanya diperbolehkan menukar maksimum f 50.

Sisanya harus diserahkan ke BNI untuk dibekukan. Hasil penukaran ORI dengan uang DJB yang baru diperkirakan hanya mencapai f 60 juta. "Jumlah tersebut amat rendah karena sebagian uang ORI telah dipalsukan selain adanya pembatasan penukaran hingga f 50 saja itu," tulis Dawam Rahardjo dkk dalam *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*.

Penyehatan Rupiah

Beredarnya uang RIS seakan mengakhiri kekacauan sirkulasi uang yang berlangsung sejak lama. Selain itu, tercapai pula penyeragaman mata uang. Dalam ungkapan Oey Beng To, yang pernah menjabat direktur Bank Indonesia tahun 1960-an, dalam *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, kebijakan ini bertujuan untuk "penyehatan" atau "pembersihan" mata uang rupiah.

Namun masalah tak serta-merta

selesai. Pemerintah Indonesia tak leluasa mengendalikan perekonomian sepenuhnya karena sirkulasi uang masih dipegang oleh DJB. Apalagi DJB sangat bergantung pada pemerintah Belanda. Wacana nasionalisasi DJB pun mengemuka. Setelah serangkaian langkah persiapan, tindakan nasionalisasi akhirnya diambil Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, termasuk juga masalah utang sesuai perjanjian KMB, tanpa menghiraukan Belanda.

"Saya nasionalisasi bank itu dan pecahlah protes, tetapi saya bisa mengatakan, 'Saya sudah berkonsultasi dengan Anda.' Sejak itu masalah keuangan diputuskan oleh dewan keuangan yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Ahli-ahli Belanda tidak diizinkan hadir," ujar Sumitro dalam *Pelaku Berkisah*.

Kendati Belanda berusaha mempertahankan kekuasaan atas DJB, nasionalisasi berjalan mulus. Nasionalisasi dilaksanakan dengan membeli saham-saham DJB dari para pemilik di dalam maupun luar negeri. Pada Desember 1951 DJB resmi dinasionalisasi, yang kemudian menjadi Bank Indonesia.

Sementara dari sisi politik, bentuk negara serikat memicu pertentangan antara kaum federalis dan unitaris, yang antara lain mewujud dalam sejumlah pemberontakan di daerah. Situasi politik dan gangguan keamanan itu tentu berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Maka, pada 17 Agustus 1950, pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar. Bentuk pemerintahan pun kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan mata uang RIS menyusul kemudian.

"Ketika RIS dibubarkan, istilah mata uang RIS juga berakhir walau sebetulnya mata uangnya sama-sama rupiah," ujar Servulus Erlan. Dengan demikian, berakhirilah penggunaan uang RIS yang

Garis Hidup Maramis

Inilah perjalanan hidup sosok "bendahara negara" Republik Indonesia pertama yang berjasa dalam terbitnya mata uang rupiah.

A. A. Maramis

Foto
Perpusnas

A.A. maramis sadar betul betapa pentingnya memiliki mata uang sendiri bagi Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Bukan semata bahwa Belanda datang kembali untuk menjajah, termasuk dengan memperkenalkan "uang NICA", tetapi juga mata uang sendiri merupakan simbol kedaulatan sebuah bangsa.

Maka, sebagai Menteri Keuangan, Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Pencetakan uang semula dilakukan di Jakarta. Namun, karena alasan keamanan, dipindahkan ke daerah. Berdasarkan peninjauan ke

beberapa daerah, Panitia menetapkan pencetakan uang dilaksanakan di Surabaya.

Pada awal November 1945, panitia telah mempersiapkan klise yang diperlukan. Maramis sudah membubuhkan tandatangannya pada bahan pencetak agar bisa segera dicetak dan diedarkan. Namun, rencana itu urung terlaksana karena meletus pertempuran di Surabaya. Setahun tertunda, akhirnya Oeang Republik Indonesia (ORI) selesai dicetak dan diedarkan pada 30 Oktober 1946.

Itulah cikal bakal uang rupiah yang kita gunakan sebagai alat pembayaran. Hingga saat ini, tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang Republik



A.A. Maramis melakukan foto bersama Soekarno.

Foto
Historia

Indonesia. Namun, tidak banyak yang mengetahui siapa sosok di balik hari bersejarah itu: A.A. Maramis.

Nasionalis Minahasa

Nama lengkapnya Alexander Andries Maramis. Dia lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 20 Juni 1897 dari pasangan Andries Alexander Maramis dan Charlotte Ticoalu. Maramis masih keponakan Maria Walanda Maramis, pejuang emansipasi perempuan asal Minahasa.

Keluarga Maramis memiliki kedudukan istimewa di Minahasa. Orangtuanya pengusaha kopra yang kaya. Dengan status sosial yang mapan, Maramis berkesempatan mendapatkan pendidikan ala Belanda. Sekolah dasar ditempuhnya di Europeesche Lagere School (ELS) di Manado. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di Hogere Burgerschool (HBS) Batavia.

Lulus dari HBS, Maramis kuliah

di Sekolah Tinggi Hukum di Leiden, Belanda. Selama di Leiden, dia terlibat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Di sinilah patriotismenya mulai terbentuk.

Maramis lulus dan membawa pulang gelar *Meester in de Rechten* (MR) tahun 1924. Meski lulusan Belanda, Maramis tak mau bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia memilih menjadi pengacara, mula-mula di Semarang, Palembang, dan selanjutnya Jakarta.

Maramis juga larut dalam kegiatan politik. Dia aktif dalam organisasi pemuda, partai politik, perkauman Kawanua, sampai organisasi gerejani. Sikap nonkooperatifnya terhadap Belanda masih kuat. Dia menolak menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat).

“Ia memang terkenal sebagai seorang yang berkepribadian kuat, pendiam, pintar, dan keras kepala,” tulis MPB Manus dkk dalam *Tokoh-tokoh*

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia II.

Posisi Maramis kian penting semasa pendudukan Jepang. Dia menjadi anggota Poesat Tenaga Rakyat (Poetera), *Chuo Sangi-in* (Dewan Pertimbangan Pusat), hingga *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Selain mewakili kelompok minoritas, pengalamannya sebagai ahli hukum internasional tentu diperhitungkan dalam BPUPKI. “Ia ikut dalam Panitia Sembilan yang membuat pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka, dan merupakan satu-satunya anggota yang beragama Kristen,” tulis Manus dkk.

Bendahara negara

Setelah Indonesia merdeka, terbentuk Kabinet Presidensial. Dalam susunan kabinet, Maramis duduk

sebagai menteri negara tanpa portofolio. Namun, dalam surat keputusan pengangkatannya, dia juga diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sementara Menteri Keuangan ialah Dr. Samsi Sastrawidagda.

Samsi hanya bekerja selama dua minggu lantaran sakit. Maka pada 25 September 1945, Maramis ditunjuk untuk menggantikannya. Dengan demikian, Maramis merupakan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia secara *de facto*. Dia mengemban jabatan itu lagi pada Kabinet Amir Sjarifuddin I (1947) dan II (1947) serta Kabinet Hatta (1948).

Selain menyusun organisasi Kementerian Keuangan dan memprakarsai pencetakan ORI, Maramis bertugas mencari dana untuk membiayai angkatan perang melalui perdagangan ke luar negeri.

“Tujuannya ialah RI harus membentuk dana devisa di luar negeri guna membiayai pos-pos perwakilan RI di luar negeri, delegasi Indonesia yang berunding dengan pihak Belanda di Jakarta, dan membayar gaji para pegawai RI yang masih tinggal di Jakarta,” ungkap wartawan Rosihan Anwar dalam *Sejarah Kecil: Petite Histoire Jilid 3*.

Menyusul Agresi Militer Belanda II dan penangkapan para pemimpin Republik, terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat, di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Maramis yang sedang berada di New Delhi, India, ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri merangkap Menteri Keuangan.

Perwakilan Indonesia di New Delhi berperan penting dalam mengembangkan hubungan diplomatik,

diplomasi, dan membentuk opini dunia atas perjuangan Indonesia. Di New Delhi Maramis memimpin sebuah badan “Pemusatan Keuangan” sebagai saluran informasi dan bantuan keuangan untuk membantu berbagai keperluan urusan diplomatik Republik di luar negeri.

“Perwakilan Indonesia di New Delhi menjadi pusat jaringan terpenting dalam hubungan-hubungan luar negeri Republik pada masa itu,” tulis Mestika Zed dalam *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia*.

Pemerintah Belanda punya penilaian khusus sehubungan kegiatan Maramis di luar negeri itu. “*Een daadkrachtige Minister van Buitenlandse Zaken en Financien in New Delhi* (Seorang Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang bertindak tegas di New Delhi). Itulah Mr. Maramis menurut penilaian pihak Belanda,” kata Rosihan.

Senjakala

Selepas pengakuan kedaulatan, Maramis bertugas sebagai duta besar di berbagai negara: Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia.

“Setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil Pemerintah RI di Uni Soviet dan Finlandia, ia bersama keluarganya menetap di Lugano, Swiss sampai tahun 1976,” tulis AS Lolombulan, A.M. Sondakh, dan H.J. Ulaen dalam *Monumen Perjuangan di Provinsi Sulawesi Utara*.

Pada 1974, Maramis tergabung sebagai salah satu anggota “Panitia Lima Kesatuan Tafsir Pancasila sebagai termaktub dalam UUD 1945” yang dipimpin Mohammad Hatta. Maramis sempat membubuhkan tanda tangan pada naskah perumusan kembali dasar negara pada 18 Maret 1975. Namun

setelah itu Maramis yang kian sepuh jatuh sakit.

Atas bantuan pemerintah dan kolega dekatnya, Maramis pulang kembali ke tanah air pada pertengahan 1976. Setelah berada setahun di Indonesia, Maramis wafat pada 31 Juli 1977 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Atas kiprah dan perjuangannya, Maramis dianugerahi sejumlah tanda kehormatan. Di antaranya Bintang Mahaputra Utama (1961), Bintang Gerilya (1963), dan Bintang Republik Indonesia Utama (1992). Lalu, pada 2019 Maramis mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Sebagai Menteri Keuangan pertama, Maramis berjasa menerbitkan uang nasional. Bahkan, pada 2007, Museum Rekor Indonesia mencatatkan nama Maramis sebagai Menteri Keuangan dengan tanda tangan terbanyak pada uang kertas. Antara tahun 1945 sampai 1947, tanda tangannya tertera pada lima belas uang kertas yang berbeda.

Kementerian Keuangan mengabadikan A.A. Maramis sebagai nama sebuah gedung besar yang monumental di kompleks Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Gedung itu, diresmikan tahun 1828, semula dirancang sebagai pendamping istana Gubernur Jenderal di Bogor. Karena urung dilakukan, gedung itu dimanfaatkan sebagai kantor besar urusan keuangan negara. Ia juga menjadi tempat pertama Maramis sebagai Menteri Keuangan bekerja pada awal kemerdekaan. Gedung ini dinamai “Gedung A.A. Maramis I”.*

Menghapus Warisan Kolonial

Untuk mempertahankan kedaulatan, pemerintah membentuk berbagai lembaga keuangan. Dari kementerian hingga bank sentral.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari struktur organisasi hingga kebijakan-kebijakan awal keuangan Indonesia.

Karena baru saja merdeka, sistem pemerintahan Jepang masih mempengaruhi berbagai lembaga di Indonesia. *Gunseikanbu Zaimubu* atau Departemen Keuangan Jepang juga menjadi patokan awal Kemenkeu.

“Struktur organisasi Kementerian Keuangan banyak mengambil alih bentuk *Gunseikanbu Zaimubu* dengan berbagai perubahan agar sesuai dengan negara merdeka dan berdaulat,” tulis Tim Departemen Keuangan dalam *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah: 45 Tahun Uang Republik Indonesia, 1946-1991*.

Tak lama, sistem dan lembaga keuangan tinggalan Jepang segera dibereskan. Pada 29 September 1945, Maramis mengeluarkan dekrit yang mempreteli hak dan kewenangan

pejabat pemerintahan tentara Jepang. Baik urusan menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang, pengeluaran negara, hingga segala urusan kas negara. Hak dan kewenangan itu diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Maramis juga menyusun organisasi Kemenkeu yang pertama; terdiri dari lima penjabatan (eselon) I: umum, keuangan, pajak, resi candu dan garam, serta pegadaian.

Langkah penting lainnya, demi kesatuan alat pembayaran yang sah, Maramis memerintahkan pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kendati mengalami hambatan, usaha itu berhasil dengan terbitnya emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, ORI ditetapkan berlaku secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Selanjutnya,



30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia.

Mendirikan bank sentral

Untuk mendukung kedaulatan Indonesia di sektor ekonomi, diperlukan bank sirkulasi. Pada 19 September 1945, Sukarno-Hatta menandatangani Surat Kuasa Pemerintah Republik Indonesia bertanggal 16 September 1945 sebagai landasan yuridis bagi persiapan pendirian bank sirkulasi: Bank Negara Indonesia (BNI).

Menurut Sri Margana dkk dalam *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945-1953*, tak semua pihak yang setuju bahwa pendirian BNI merupakan jalan terbaik untuk mendirikan kebijakan moneter yang kuat. Ir. Soerachman Tjorkoadisoerjo, misalnya, menginginkan agar pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank (DJB) saja.

Soerachman kala itu menjabat Menteri Kemakmuran. Sementara

DJB merupakan bank sirkulasi Hindia Belanda sejak 1828 sampai dilikuidasi Nanpo Kaihatsu Ginko, bank sirkulasi era pendudukan Jepang.

Tapi pemerintah sudah mengambil keputusan. Untuk mewujudkan impian itu, pada 9 Oktober 1945 didirikanlah Poesat Bank Indonesia (PBI). Badan ini bertugas mempersiapkan pembentukan BNI dan menjalankan kebijakan keuangan sebagaimana bank sirkulasi bekerja.

Selain itu, PBI berperan memberikan kredit dengan bunga serendah-rendahnya dan menjadi pusat penyimpanan uang masyarakat. PBI juga mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan di bidang ekonomi.

“Serta merta masyarakat mulai mempercayakan dan menyimpan uang mereka pada bank tersebut. Dalam waktu singkat terkumpul sebanyak Rp 31 juta (uang Jepang) yang digunakan sebagai modal bank,” tulis Oey Beng To dalam *Sejarah Kebijakan Moneter*

Gedung
Bank
Indonesia

Foto
Historia

Indonesia Jilid 1 (1945-1958).

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 berdirilah BNI sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. BNI diresmikan pada 17 Agustus 1946 oleh Mohammad Hatta di gedung bekas DJB cabang Yogyakarta. PBI pun dilebur ke dalam BNI.

Dalam masa perang, BNI mengalami banyak kesulitan. Tugasnya sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum cukup berat. Bank baru ini juga harus mengurus cabang-cabang PBI di Jakarta, Solo, Malang dan Kediri yang beralih menjadi cabang BNI. Sementara Belanda terus merongrong. Urusan keuangan otomatis kena imbasnya. BNI keteteran. Peredaran ORI terhambat dan BNI tak mampu menjangkau beberapa kawasan Republik.

Sri Margana dkk menyebut agresi militer Belanda I mendorong BNI untuk mendesentralisasi sistem keuangan. Pemimpin daerah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan uang yang dikenal dengan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

Lalu, setelah serangan Belanda terhadap Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin Republik, kantor besar BNI ditutup. Satu-satunya cabang BNI yang masih berfungsi terdapat di Kutaraja, Aceh. Di sini ORI edisi terbaru yang dikeluarkan pada 17 Agustus 1948 dicetak dan diterbitkan dengan tanda-tangan menteri keuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi, Sumatra.

“Uang ORI Baru (ORIBA) tersebut hanya mendapatkan sirkulasi yang terbatas di Aceh dan kawasan-kawasan tertentu Sumatera. Tetapi ORI tetap beredar dalam jumlah yang besar di seantero Indonesia, khususnya di wilayah Republikan yang setelah Agresi

Militer Kedua telah berada di tangan Belanda,” tulis Sri Margana dkk.

Peran BNI sebagai bank sirkulasi dan bank sentral berakhir melalui keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Nasionalisasi DJB

KMB menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. “Alasan utama mengapa Belanda menginginkan agar posisi bank sentral dipertahankan oleh DJB dan bukan oleh BNI adalah karena kesepakatan bahwa hutang Hindia Belanda itu diturunkan kepada RI merdeka lewat RIS,” tulis Sri Margana dkk.

Tak semua pemimpin Republik puas dengan penunjukkan DJB. Sumitro Djojohadikusumo yang jadi anggota penuh delegasi Indonesia di KMB salah satunya. Dia menginginkan agar BNI menjadi bank sentral.

“Seperti Simatupang menginginkan tentara Republik menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), jadi bukan KNIL (Royal Netherlands Indies Army), begitulah saya menginginkan BNI menjadi bank sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Betapapun primitifnya TNI, ia adalah tentara kita! Sama juga dengan BNI. Saya merasa, itu adalah bank kita,” ujar Sumitro dalam *Pelaku Berkisah*.

Sri Margana dkk menyebut keputusan KMB itu merupakan bukti dari kegagalan BNI. BNI belum siap untuk menjadi bank sentral. Tenaga terdidik amat terbatas. Kemudian kebijakan desentralisasi keuangan dengan membolehkan percetakan ORIDA menunjukkan bahwa BNI tak pernah memiliki kontrol utuh atas arah moneter Indonesia.

“Dibandingkan dengan DJB yang memiliki kemampuan yang lebih

profesional, maka beralasan pula bahwa akhirnya DJB pula yang akan ditunjuk sebagai bank sentral RIS,” tulis Sri Margana dkk.

BNI sendiri kemudian menjadi bank umum melalui Undang-Undang (UU) Darurat No. 2 tahun 1955. Namanya berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946 (BNI '46) setelah dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1968. Penambahan 1946 menegaskan eksistensi historis bank perjuangan ini.

Tugas-tugas yang sebelumnya diemban BNI pun dilimpahkan kepada DJB. Namun, saat itu pimpinan-pimpinan DJB masih dipegang oleh orang Belanda. Baru pada 15 Juli 1951 pemerintah mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden direktur.

Menurut Sri Margana dkk, kendati mendapat mandat, DJB tak pernah sepenuhnya berhasil sebagai bank sentral. Ini karena beberapa alasan. Pertama, DJB merupakan bank swasta dan hanya sebagian dimiliki oleh negara. Kedua, kaitan DJB dengan Negeri Belanda. Pasar uang DJB berada di Belanda. Sebagian besar dari hasil pembagian untung sampai kelebihan likuiditas tabungan ditransfer ke Belanda.

“Hal di atas mengakibatkan DJB tidak bisa mewujudkan dirinya sebagai *lenders of last resort*, apalagi *banker's bank*,” tulis Sri Margana dkk.

Hal itu pula yang mendorong pemerintah untuk menasionalisasi DJB. Di antara pemimpin Indonesia muncul keinginan untuk mengubah warisan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu caranya dengan menasionalisasi DJB.

Menurut Moh. Saubari, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan pada awal 1950-an, niat pemerintah



Suasana di depan gedung Bank Negara Indonesia

Foto Historia

itu diumumkan Menteri Keuangan Jusuf Wibisono pada akhir April 1951. Keputusan pemerintah itu kemudian disampaikan Perdana Menteri Sukiman kepada Parlemen (DPR) dalam bentuk saran resmi. Kemudian Komisi Nasionalisasi Bank Jawa dibentuk pada 3 Juli 1951. Komisi ini diberi wewenang untuk mengambil segala langkah persiapan yang diperlukan ke arah nasionalisasi dan merancang

perundang-undangannya.

Atas nasihat Komisi, pemerintah memutuskan melakukan nasionalisasi dengan membeli saham dari para pemegang saham dan sertifikat DJB. “Pembelian saham-saham itu berjalan lancar, dan dalam waktu singkat 97 persen seluruh saham sudah terbeli oleh pemerintah,” ujar Saubari dalam *Pelaku Berkisah*.

Melalui UU No. 11 Tahun 1953

atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI), DJB diganti dengan badan baru, yakni Bank Indonesia (BI), yang bertindak sebagai bank sentral. Sesuai tanggal berlakunya UUPBI, 1 Juli kemudian diperingati sebagai hari lahir BI.

Peralihan dari DJB ke BI tidak berjalan serta-merta. Hal ini terutama karena tenaga ahli dan kader-kader dalam jajaran pegawai BI masih terbatas. Dalam “Kursus-kursus Bank Indonesia di Masa Awal” yang dimuat laman *bi.go.id* disebutkan, dari segi kepegawaian, misalnya, dari delapan jabatan direktur muda, tak ada satu pun yang dijabat orang Indonesia. Begitu pula dari 32 pejabat di kantor pusat, hanya empat pejabat Indonesia.

Melihat keterbatasan itu, Sjafruddin Prawiranegara selaku gubernur BI pertama menyelenggarakan kursus-kursus dan praktik kerja (*job training*) di kantor pusat BI dan di luar negeri. BI juga menyelenggarakan kursus pengawasan dan pemeriksaan bank lewat program “*bank examination course*”.

Setelah BI berdiri, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yang diterbitkan pemerintah (Kemenkeu) dan BI. Pemerintah menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan BI menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Sesuai UU No. 13 tahun 1968, demi keseragam dan efisiensi, BI diberikan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.

Saat ini, uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) dan BI berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.*

Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa

Peresensi CS. Purwowidhu

Tak bisa dinafikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran vital dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara, bahkan semenjak kelahirannya di fase awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ketika pemerintah membutuhkan dana awal untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan, Kemenkeu yang pada masa itu bernama Departemen Keuangan (Depkeu), melalui Menteri Keuangan pertama, Dr. Samsi, mengeluarkan kebijakan Operasi Penggedoran Bank.

Dr. Samsi lalu digantikan oleh A.A. Maramis pada 2 September 1945. Pada masa itu pula Depkeu mulai menata organisasi. Kualitas pemimpin menjadi kriteria utama dalam menyusun organisasi kala itu. Depkeu harus dipimpin oleh para pejabat yang memiliki loyalitas tinggi kepada bangsa, negara, dan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan struktur organisasi Depkeu banyak mengambil alih bentuk “Gunseikanbu Zaimubu” dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan negara merdeka dan berdaulat. Ada lima Pejabatan –sekarang disebut Eselon I- yang dibentuk saat itu, yakni Pejabatan Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan Pajak, Pejabatan Resi, Candu, dan

Garam, dan Pejabatan Pegadaian.

Situasi ekonomi saat itu memburuk akibat defisit anggaran belanja karena pengeluaran besar-besaran di bidang militer untuk mempertahankan kemerdekaan, ditambah dengan hiperinflasi karena meningkatnya peredaran uang Jepang dan NICA di masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mulai merintis persiapan penerbitan mata Oeang Republik Indonesia (ORI) yang dikoordinasi oleh Depkeu. Hal ini mendorong Depkeu yang saat itu dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk menyesuaikan struktur organisasi. Jumlah pejabatan ditambah dengan Pejabatan Uang, Kredit, dan Bank, Pejabatan Bea dan Cukai, dan Pejabatan Pajak Bumi.

ORI akhirnya berlaku secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemberlakuan ORI sebagai alat pembayaran yang sah dan untuk membiayai revolusi, tidak hanya membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, melainkan juga membangun kesadaran bahwa negara Indonesia telah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri.

Semenjak dulu, Kemenkeu juga senantiasa terbuka untuk melakukan perbaikan. Pembekuan Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 1985 akibat maraknya penyelundupan masa itu menjadi salah satu contohnya. Sementara waktu Bea dan Cukai ditutup dan fungsinya digantikan



Judul Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa

Hal 489 Hal

Penerbit Kementerian Keuangan

oleh Société Générale de Surveillance (SGS) dari Swiss. Selama kurun waktu itu, Bea dan Cukai pun memperbaiki diri menjadi makin akuntabel sehingga mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugasnya kembali.

Itulah sekilas ulasan beberapa catatan sejarah yang mengiringi dinamika organisasi Kemenkeu, yang dipotret dengan apik mulai era 1945 - 2019 dalam buku *Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa*.



Memperingati Hari Oeang ke-74
30 Oktober 1946 - 30 Oktober 2020



HARI BATIK NASIONAL
2 OKTOBER 2020

Foto
ANRI

